

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 11, 22 Dan 25 Juni 2015



TENTANG
RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Hari : KAMIS
Tanggal : 11 Juni 2015
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
3. Pengumuman Pemberhentian Bupati Rembang;
4. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 34 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 11 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

- Yang terhormat Bupati Rembang;
- Yang sayahormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri dan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 dalam keadaan sehat wal afiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 Mei 2015, Rapat Paripurna hari ini merupakan Rapat Paripurna pertama dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang

Tahun 2014 dengan agenda Penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD. Dan menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 34 orang.

Dengan demikian Rapat Paripurna pada hari ini telah memenuhi kuorum. Selanjutnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut perlu saya sampaikan bahwa pada Pasal 78 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa " kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena berakhir masa jabatannya ".

Adapun masa jabatan Bupati Rembang akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2015.

Dan pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “ Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian “.

Merujuk hal tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang mengajukan permohonan kepada DPRD untuk diagendakan rapat paripurna pengumuman pemberhentian kepala daerah melalui surat Bupati Rembang Nomor 131/1178 Tanggal 8 Juni 2015 Perihal Proses Akhir Masa Jabatan Bupati Rembang.

Sementara hasil rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 27 Mei 2015 belum mengakomodir kegiatan pengumuman pemberhentian kepala daerah dalam rapat paripurna. Namun demikian apabila dikehendaki dan disetujui oleh forum rapat paripurna selaku forum rapat tertinggi DPRD, agenda pengumuman pemberhentian Bupati Rembang periode 2010-2015 sebagaimana permohonan Bupati Rembang tanggal 8 Juni 2015 dapat dimasukkan dalam salah satu materi acara dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini :

“ Apakah dapat disetujui pengumuman pemberhentian Bupati Rembang yang habis masa jabatannya pada tanggal 20 Juli 2015 dimasukkan dalam rapat paripurna hari ini ?”

===== Setujuu =====

(Dengan Suara Bulat Semua Anggota DPRD Menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Dengan demikian susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014;
3. Pengumuman Pemberhentian Bupati Rembang;
4. Penutup.

Marilah kita masuk acara kedua yang merupakan acara pokok dalam rapat paripurna ini, yaitu Penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014. Saya mohon kepada peserta rapat untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Rembang.

Kepada Saudara Bupati, dipersilahkan.

===== PENJELASAN BUPATI =====

➤ (Penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 terlampir)

Ter ma kasih Sdr. Bupati Rembang atas penjelasannya

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Kita masuki acara ketiga yaitu Pengumuman Pemberhentian Bupati Rembang.

Dengan merujuk Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan atas dasar persetujuan dari rekan-rekan anggota, maka saya umumkan dalam rapat paripurna ini bahwa “**Pemberhentian Bupati Rembang Periode 2010-2015 karena berakhir masa jabatannya berlaku sejak tanggal 20 Juli 2015**”.

Selanjutnya setelah pengumuman ini, akan diusulkan pemberhentian Bupati Rembang periode 2010-2015 oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan penetapannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Tanpa terasa agenda Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui dan kita laksanakan dengan baik, maka selesai sudah Rapat Paripurna pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat.

Untuk rapat paripurna kedua membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 sebagaimana jadwal yang ditetapkan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, dengan agenda pokok : ***”Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi dan jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksiterhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014”***.

Akhirnya dengan mengucapkan "Alhamdulillah" "obbi" "alamin" tepat pukul 12.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

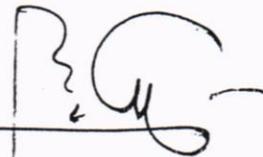
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS

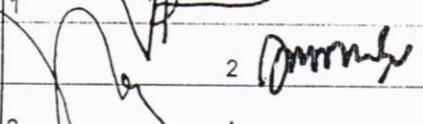
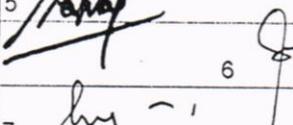
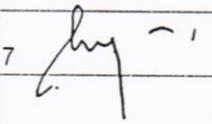
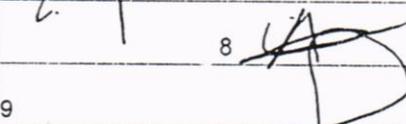
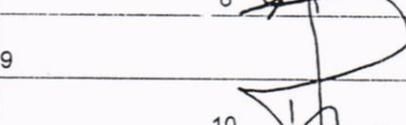
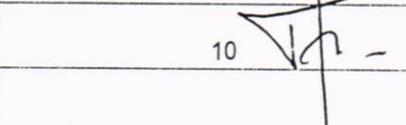
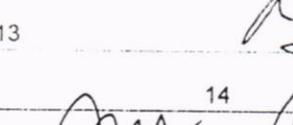
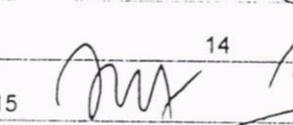
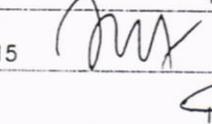
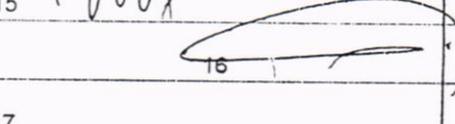
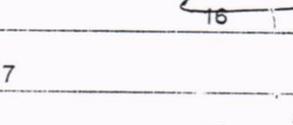
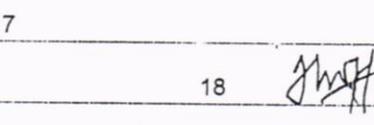
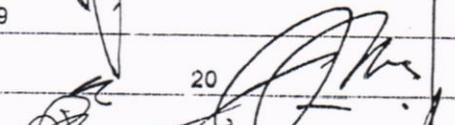
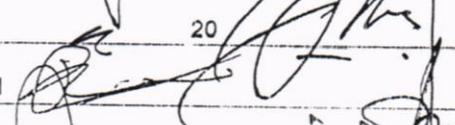
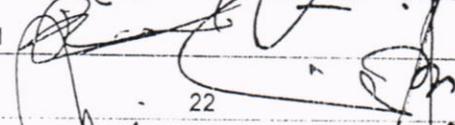
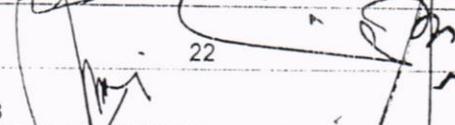


Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2014**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Bupati tentang Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2014;
- LAMPIRAN III : Pengantar Nota Keuangan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2014.
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
7 Tahun 2015 tentang Pengumuman
Pemberhentian Bupati Rembang Periode 2010 -
2015.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014
HARI/TANGGAL : KAMIS, 11 JUNI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI PARTONO, S.Pd, MII	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MII	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, SE	Anggota		
18	MUGIYARTO, ST	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, BA	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		

N A M A		JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	

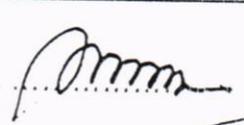
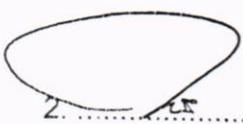
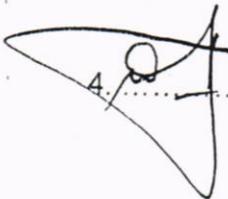
Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : C/rti
- 4 DL : Dinas Luar



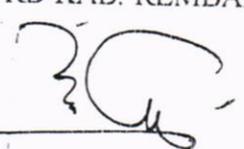
DAFTAR HADIR
 RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
 DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014

HARI/TANGGAL : KAMIS , 11 JUNI 2015
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	<i>Brubawo, SH</i>	Kejaksaan Negeri Rembang	2. 
3	Pengadilan Negeri Rembang	3.
4	<i>Letkol Inf Wawan I, SPd</i>	Dandim 0720 Rembang	4. 
5	<i>Kampani yanyat Sy</i>	Kepolisian Resort Rembang	5. 
6	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6.
7	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7. 



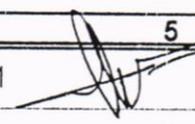
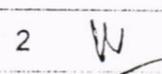
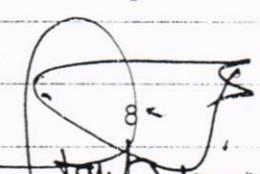
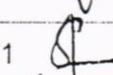
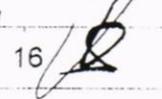
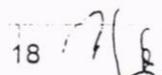
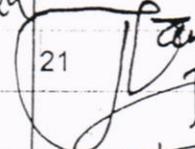
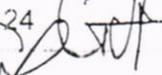
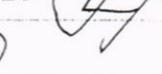
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



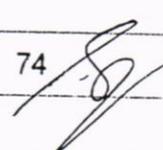
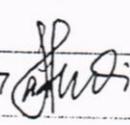
Dr. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014**

HARI/TANGGAL : KAMIS , 11 JUNI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Non effendi		1 
2	STAF AHLI BUPATI	Wartono		2 
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Alexandee		8 
9	BAG. HUKUM	Eddy Djoko P	Kabang.	9 
10	BAG. HUMAS	Yohanis W	Kabang	10 
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Guntharto		11 
12	BAG. ADM PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN PAKYAT	Abdullah		13 
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Herjanto	my	14 
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End Suhawati	aspek	15 
16	BAG. UMUM	Sumi	umum	16 
17	DPPKAD	Wahri	DPPKAD	17 
18	INSPEKTORAT			18 
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	Spamet Budi	Kamby Ken	20 
21	B K D	Bambang R.	Kabid	21 
22	BKP & P4K	Pouco S		22 
23	R.P 3 D	Anjar	Selamatan	23 
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24 
25	DINAS KESEHATAN	Tihel w.	Kabid Puskesmas	25 
26	DINAS PENDIDIKAN	Winaryu K		26 
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Montre	Kodun	27 
28	DINTANHUT	Cipto		28 
29	DINLUTKAN			29 

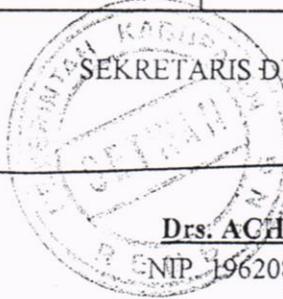
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO	FARIS M.	Kasi	30
31	DINAS DUKCAPIL	NUGRORO	Demok	31
32	DINSO3NAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryam	Sepirin	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rustiyanti	Sek	35
36	KANTOR KESEBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka.	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR PPT	SM Sugi parta	KPPT	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Y.E. Sugi parta	kep TV	39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	Kep. Slamet Subrij		41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASSEM			47
48	FT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH	Setyorini. B	Ka - Unit	49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	Iswaini	Kantong TV	52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN	<i>Ny. H. SUCIPTONO</i>		71 
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG	<i>Syaikh R.</i>		74 
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	<i>Reza MASUDI</i>	<i>Reporter</i>	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95				95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	TA FIS	A. W. ...		96
97		97
98		98
99	BUS NO.	LSM. SEMUT		99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

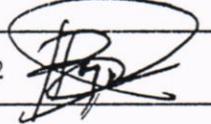

Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011



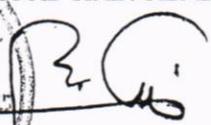
DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014

HARI/TANGGAL : KAMIS , 11 JUNI 2015

PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	Taswadi.....	5 
6	CAMAT PAMOTAN	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	Subagyo.....	12 
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUMUMAN PEMBERHENTIAN BUPATI REMBANG
PERIODE 2010 - 2015 KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah karena berakhir masa jabatannya diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati untuk mendapatkan penetapan pemberhentian ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Rembang sisa masa jabatan tahun 2010-2015 atas nama H. Abdul Hafidz tertanggal 6 April 2015, akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Juli 2015 ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu mengumumkan pemberhentian Bupati Rembang periode 2010-2015 karena berakhir masa jabatannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-689 Tahun 2015 Tanggal 16 Maret 2015 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

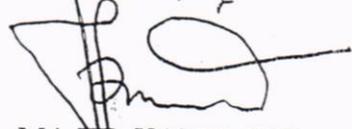
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengumumkan Pemberhentian Bupati Rembang Periode 2010-2015 atas nama H. ABDUL HAFIDZ karena berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Juli 2015 ;
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Juni 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua, 

H. MAJID KAMIL MZ



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014**

Tanggal, 11 Juni 2015

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala SKPD se
Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Mengawali pertemuan kali ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan RidhoNya-lah kita dapat berkumpul bersama dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara **“Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014”** dalam keadaan sehat wal’fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya menyampaikan ucapan **terima kasih** dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk kemajuan daerah serta

3

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu, pada setiap akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam Pasal

4

101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran terakhir.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.384.690.314.469,00 (***Satu trilyun tiga ratus delapan puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat belas***

ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.329.587.756.593,37 (**Satu trilyun tiga ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tiga puluh tujuh**) atau 96,02%.

Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.540.612.631.176,00 (**Satu trilyun lima ratus empat puluh milyar enam ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)** direalisasikan sebesar Rp. 1.275.908.646.560,06 (**Satu trilyun dua ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah koma enam**) atau 82,82%.

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 167.086.316.707,00

(Seratus enam puluh tujuh milyar delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) realisasinya sebesar Rp.167.066.868.874,34 **(Seratus enam puluh tujuh milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh empat)** atau 99,99%. Dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 11.164.000.000,00 **(Sebelas milyar seratus enam puluh empat juta rupiah)** realisasinya sebesar Rp. 11.162.450.842,00 **(Sebelas milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)** atau 99,99%

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada

umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

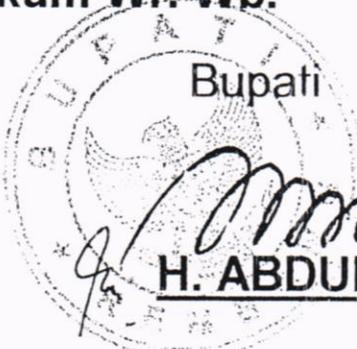
Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai masih terdapat kekurangan dan hambatan yang semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan serta perlu penyelesaian demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang. Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih sempurna.

Bersama Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 ini dilampirkan buku-buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

rangka membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik lagi.Amiin.

Sekian, terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

 Bupati Rembang

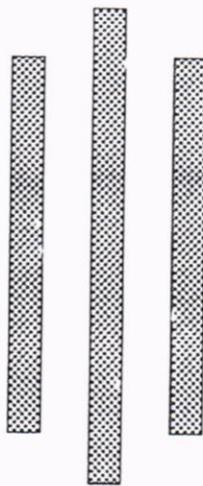
H. ABDUL HAFIDZ



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR
NOTA KEUANGAN

LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN

2014



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yth. Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah terlebih dahulu kita menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat bertemu dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu pada setiap akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil - hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 .

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam pasal 101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.384.690.314.469,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.329.587.756.593,37 atau 96,02%. Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.540.612.631.176,00 realisasinya adalah sebesar Rp.1.275.908.646.560,06 atau 82,82% sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.167.086.316.707,00 realisasinya sebesar Rp.167.066.868.874,34 atau 99,99% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.11.164.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 11.162.450.842,00 atau 99,99%

Berikut ini kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 :

URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%
PENDAPATAN	1.384.690.314.469	1.329.587.756.593,27	96,02
PENDAPATAN ASLI DAERAH	159.050.536.339,00	165.530.925.487,27	104,07
Pendapatan Pajak Daerah	32.816.917.000,00	38.643.241.316,00	117,75
Pendapatan Retribusi Daerah	38.845.073.000,00	41.529.546.666,00	106,91
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.222.204.000,00	6.183.205.661,00	99,37
Lain-lain Pendapat Asli Daerah yang Sah	81.166.342.339,00	79.174.931.844,27	97,55
PENDAPATAN TRANSFER	1.075.105.360.130,00	1.021.258.285.387,00	94,99
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	790.115.861.651,00	775.863.183.184,00	98,20
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	232.816.985.000,00	172.399.233.000,00	74,05
Transfer Pemerintah Provinsi	52.172.513.479,00	72.995.869.203,00	139,91
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	150.534.418.000,00	142.798.545.719,00	94,86
Pendapatan Hibah	709.270.000,00	541.721.500,00	76,38
Pendapatan Lainnya	149.825.148.000,00	142.256.824.219,00	94,95
BELANJA	1.540.612.631.176	1.275.908.646.560,06	82,82
BELANJA OPERASI	1.318.411.638.283,00	1.124.356.607.798,06	85,28
Belanja Pegawai	865.829.901.050,00	719.607.633.192,00	83,11
Belanja Barang	363.818.366.438,00	327.292.056.989,06	89,96
Belanja Bunga	37.000.000,00	14.340.417,00	38,76
Belanja Subsidi	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Hibah	45.093.345.800,00	39.727.209.200,00	88,10
Belanja Bantuan Sosial	4.313.525.000,00	2.552.273.000,00	59,17
Belanja Bantuan Keuangan	39.319.500.000,00	35.163.035.000,00	89,43
BELANJA MODAL	221.200.992.888,00	151.454.913.762,00	68,47
Belanja Tanah	525.450.000,00	521.915.000,00	99,33
Belanja Peralatan dan Mesin	53.950.652.250,00	30.362.332.519,00	56,28
Belanja Bangunan dan Gedung	74.060.400.050,00	44.216.272.531,00	59,70
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.524.453.588,00	74.413.567.612,00	92,41
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.140.037.000,00	1.940.826.100,00	15,99
BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	97.125.000,00	9,71
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	97.125.000,00	9,71
SURPLUS / (DEFISIT)	(155.922.316.707)	53.679.110.033,21	(34,43)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN DAERAH	167.086.316.707,00	167.066.868.874,34	99,99
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	167.086.316.707,00	167.066.868.874,34	99,99

URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%
PENGELUARAN DAERAH	11.164.000.000,00	11.162.450.842,00	99,99
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.109.000.000,00	11.109.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00	53.450.842,00	97,18
Pembiayaan Netto	155.922.316.707,00	155.904.418.032,34	99,99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	209.583.528.065,55	0,00

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Rembang masih juga terdapat kekurangan - kekurangan dan hambatan yang semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas - tugas mendatang. Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih sempurna.

Bersama Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 ini dilampirkan buku-buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Rembang,
BUPATI REMBANG


H. ABDUL HAFIDZ

**RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RANCANGAN PERDATENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014**

Tanggal 17 Juni 2015

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Bupati Rembang
- Yang sayahormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua undangan lainnya.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT , Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita berkesempatan melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna II (kedua) DPRD Kabupaten Rembang membahas Raperdatentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014. Dan sebagai insan yang bertaqwa kepada Allah SWT untuk tidak henti-hentinya memanjatkan do'a, semoga setiap aktifitas dan langkah kita sehari-hari selalu dalam lindungan-Nya, serta mendapatkan berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamiin.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Agenda pokok dalam rapat paripurna pertama tanggal 11 Juni 2015 adalah Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014. Selanjutnya yang menjadi agenda pokok dalam rapat paripurna kedua hari ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang adalah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi dan Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 21 orang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dinyatakan syah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian Rapat Paripurna saya nyatakantidak **memenuhi kuorum**.

Pada Pasal 80 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan bahwa “ Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, setelah penundaan pertama yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 23 orang. Dengan demikian Rapat Paripurna II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 pada hari ini dinyatakan **tidak memenuhi kuorum**.

Untuk itu rapat saya tunda selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, setelah penundaan pertama dan kedua yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 23 orang. Dengan demikian, kuorum rapat paripurna hari ini **belum terpenuhi**.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Tata Tertib DPRD ditegaskan bahwa “ Apabila pada waktu akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah “.

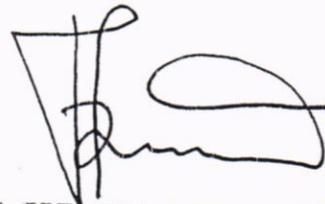
Untuk itu pelaksanaan Rapat Paripurna II membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi dan penyampaian jawaban bupati saya tunda, dan akan dilaksanakan kembali dengan agenda yang sama besok pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 jam 09.30 WIB tempat ruang paripurna DPRD.

(Ketuk palu 1 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua



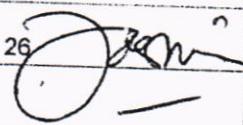
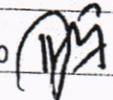
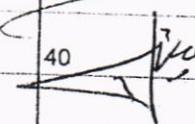
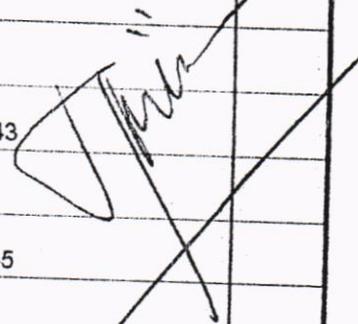
H. MAJID KAMIL MZ

MEMBAHAS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. REMBANG TH. 2014

HARI/TANGGAL : RABU, 17 JUNI 2015

PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASY M	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26 
27	WIDODO	Anggota	27 
28	ALI IECHAM, ST	Anggota	28
29	SUMARSIH	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
35	PUJI SANTOSO, SP. MH	Anggota	35 
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39 
40	H. JOKO SUPRIHAD, SH	Anggota	40 
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42
43	SUKARMAIN	Anggota	43 
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44 
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPJ	Anggota	45

eterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar

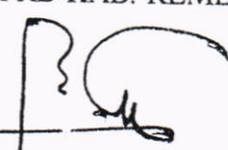


DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014

HARI/TANGGAL : KAMIS , 17 JUNI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

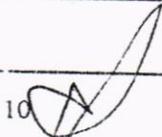
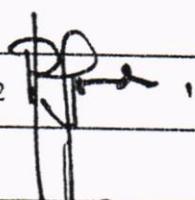
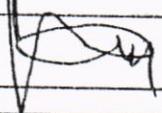
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1.
2	Kejaksaan Negeri Rembang	2.
3	Pengadilan Negeri Rembang	3.
4	Dandim 0720 Rembang	4.
5	Kepolisian Resort Rembang	5.
6	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6.
7	HAMZAR FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

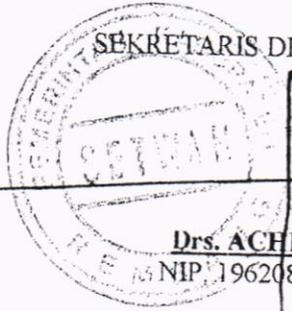
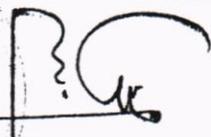

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014

HARI/TANGGAL : KAMIS , 17 JUNI 2015
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	<i>Juharto</i>	10 
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	<i>HM. Maripanta</i>	12 
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	<i>Eddy Kuntanto</i>	14 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

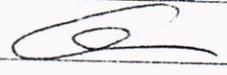
**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014**

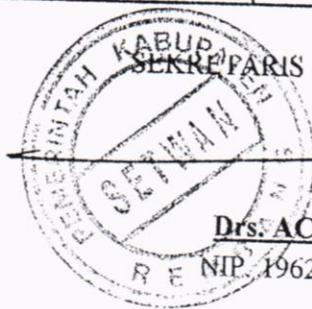
HARI/TANGGAL : KAMIS , 17 JUNI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SAB	1
2	STAF AHLI BIJIPATI	Nur Effendi	SAB	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	JOHANAWAN		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gunawan		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Haryanto	Kabid	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Endang Sukamuli	Kepes	15
16	BAG. UMUM	Purno	Kepu	16
17	DPPKAD	MUSTOWI	Kepu	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	S Ramet Budi	Kesby	20
21	BKD			21
22	BKF & F4K			22
23	B P B D	SUHARNO	Kesby	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN	Mardani	Kabid	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT			28

1	2	3	4	5
30	DINHU 3KOMINFO			30
31	DINAS DUKCAPIL	NUGROHO	Dinkub	31
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARFORA	SURYAWATI	selu	33
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryasa		34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pustiyanto		35
36	KANTOR KESEANGPOLINMAS			36
37	KANTOR PERFUST & ARSIP	Esi W	Ka Perust	37
38	KANTOR PPT	Sri Sugianti	Ka KPPT	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Iqus Setiawan	RSUD.	39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	Ny. Ndau S Subag	Bes.	41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG	Wawang Haidijah	Wapinea	45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROFINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	SUMITRO	Kasie	52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KP-H MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KP-H KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH ;			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YIPPI REMBANG	<i>Nashita</i>	<i>Rembang III</i>	74 <i>7</i>
75	DPC PFP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA	<i>Mulyanti</i>		85 <i>Mulyanti</i>
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95				95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Diri Saputo	RSU		96 
97	FRS DPRD	SWARTATO	TA FICS	97 
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290 Kode Pos 59212

REMBANG

BERITA – ACARA PENUNDAAN RAPAT PARIPURNA II DPRD MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014

NOMOR : 170 / 308 / 2015

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MAJID KAMIL MZ
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

menyatakan bahwa Rapat Paripurna II DPRD membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi dan Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi tidak memenuhi kuorum , dikarenakan secara fisik hanya dihadiri oleh 23 orang dari sejumlah anggota sebanyak 45 orang.

Dengan merujuk Pasal 80 ayat (4) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , rapat paripurna ditunda selama 5 (lima) menit. Adapun sampai batas akhir penundaan dari sejumlah anggota sebanyak 45 orang yang hadir secara fisik adalah sebanyak 23 orang, dan rapat dinyatakan tidak memenuhi kuorum.

Dengan merujuk Pasal 80 ayat (4) Tata Tertib DPRD, oleh pimpinan rapat ditetapkan bahwa Rapat Paripurna dengan agenda yang sama dilaksanakan kembali pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 tempat di ruang paripurna DPRD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 17 Juni 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2014**

Hari : Senin
Tanggal : 22 Juni 2015
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
3. Skors;
4. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi;
5. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 37 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang

7. Fraksi Harapan

: 2 orang

Jumlah

: 8 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat Bupati Rembang

Yang sayahorinati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Rembang.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya horinati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan
semua undangan lainnya.

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan berkah kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan keindahan Ramadhan ditahun ini dan pada hari ini pula kita masih berkesempatan melaksanakan Rapat Paripurna II (kedua) DPRD membahas Raperdatentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014dengan agenda pokok penyampaian pemandangan umum fraksi dan penyampaian jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi.

Marilah bulan ramadhan bulan yang penuh ampunan ini, semakin kita tingkatkan nilai keimanan kita dengan banyak beribadah agar kelak kita bisa mendapatkan surga dari Allah SWT. Amiin.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Rapat Paripurna II ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna dengan agenda yang sama pada tanggal 17 Juni 2015, dimana dalam pelaksanaannya terjadi penundaan dikarenakan kuorum rapat tidak terpenuhi. Sampai batas akhir penundaan dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik adalah sebanyak 23 orang maka rapat dinyatakan tidak memenuhi kuorum. Dengan merujuk Pasal 80 ayat (4) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, oleh **pimpinan rapat** ditetapkan bahwa Rapat Paripurna II membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi dan Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi dilaksanakan kembali pada hari ini **Senin tanggal 22 Juni 2015**.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dinyatakan syah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 37 orang. Dengan demikian Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat dimulai.

Dengan mengucap ” *Bismillahirrohmaanirrohiim* ” Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014;
3. Skors;
4. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014;.
5. Penutup.

Untuk menyingkat waktu, marilah kita masuk ke acara yang kedua, yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014. Agar di dalam penyampaian nya dapat berjalan dengan tertib, kepada Saudara- saudara yang akan mewakili Fraksi dalam penyampaian

Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Henry Purwoko, S.Pd
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Mugiyarto, ST
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Muh. Asnawi, S.Pdi
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Widodo
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. H. Chasanuddin
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H. Joko Supriyadi, SH
7. Fraksi Harapan : Sdri. Paramiata Prapanca ANR

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan saya persilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umumnya.

=== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ===

➤ (*Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 terlampir*)

Terima kasih kepada Saudara- saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara berikutnya yaitu Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014. Namun sebelumnya, perlu kita berikan kesempatan kepada Saudara Bupati dalam mempersiapkan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi dimaksud.

Untuk keperluan tersebut maka rapat saya skors selama 45 (empat puluh lima) menit.

(*Ketuk palu 1 kali*)

=====SKORSING=====

Sehubungan waktu yang diberikan untuk mempersiapkan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi telah habis, maka skors saya cabut dan tepat pukul 14.10 WIB Rapat Paripurna saya buka kembali.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan acara yakni Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Kepada Saudara Bupati dipersilahkan untuk menyampaikan jawabannya.

===== JAWABAN BUPATI ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI =====

➤ (*Jawaban Bupati atas Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 terlampir .)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara dalam rapat paripurna hari ini telah kita lalui dan selesai sesuai dengan agenda acara yang dijadwalkan. Sebelum saya akhiri perlu saya sampaikan bahwa setelah rapat paripurna ini, adapula agenda rapat yang akan dilaksanakan pada hari ini juga yaitu Rapat Banggar dengan TAPD dalam rangka penjelasan lanjutan atas Raperda, kemudian Rapat Banggar dengan Pimpinan Komisi membahas strategi dan distribusi pembahasan raperda serta Rapat Komisi dengan SKPD dalam rangka pendalaman Raperda.

Akhirnya dengan mengucapkan “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 14.50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

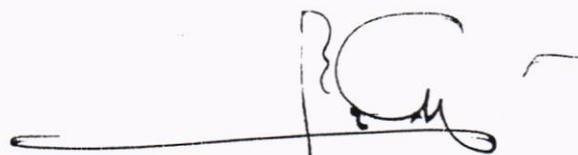
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS

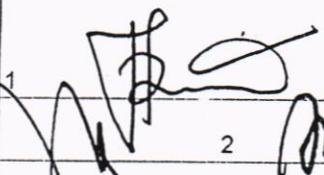
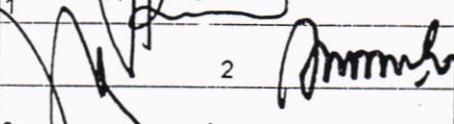
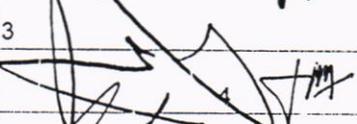
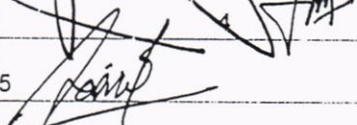
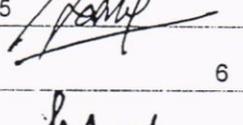
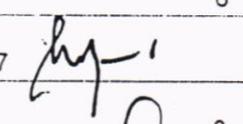
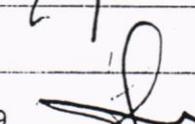
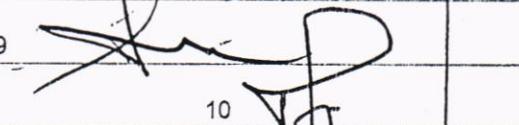
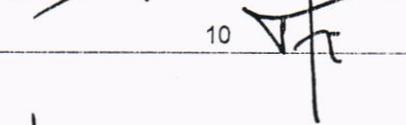
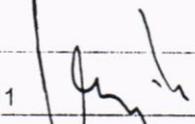
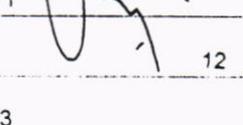
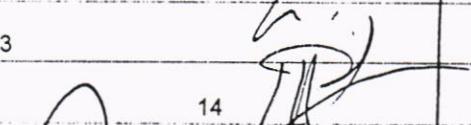
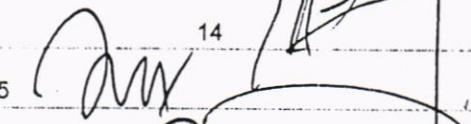
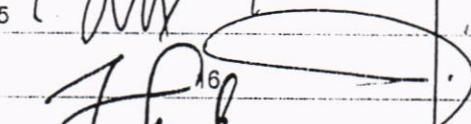
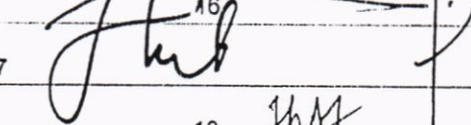
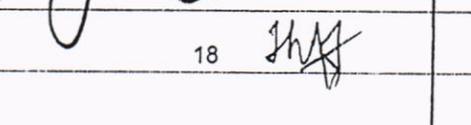
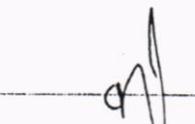
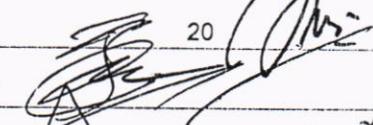
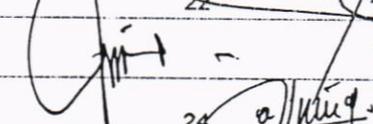
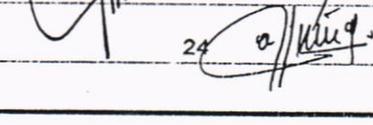


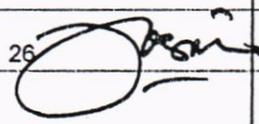
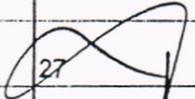
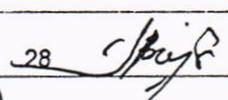
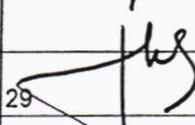
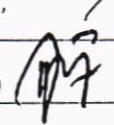
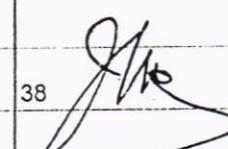
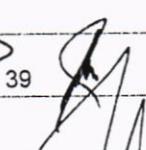
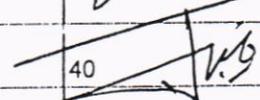
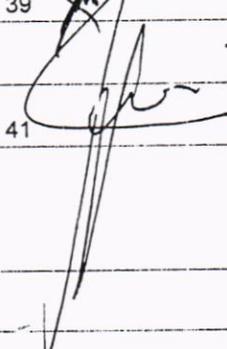
Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2014**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Berita Acara Penundaan I (Pertama) Rapat
Paripurna II tentang Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014
Tanggal 17 Juni 2015 Nomor 170/306/ 2015;
- LAMPIRAN III : Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2014;
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. REMBANG TH. 2014
HARI/TANGGAL : SENIN, 22 JUNI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketva DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULSTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSJORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pj. MH	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, SE	Anggota		
18	MUGIYARTO, ST	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRCN	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, BA	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJ SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CAIUR WINANTO, SH	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	

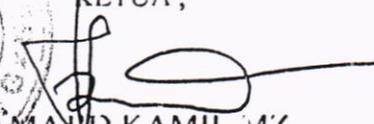
Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



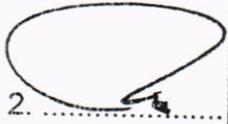
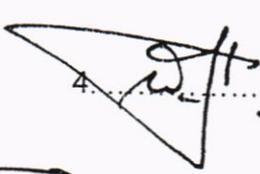
DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,


H. MAUD KAMIL MZ

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014

HARI/TANGGAL : SENIN , 22 JUNI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1.
2	<i>B. W. S.</i>	Kejaksaan Negeri Rembang	2. 
3	Pengadilan Negeri Rembang	3.
4	<i>Letkol Wawan S. S.P.</i>	Dandim 0720 Rembang	4. 
5	<i>Kep. Yuzuf Syaifur</i>	Kepolisian Resort Rembang	5. 
6	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6.
7	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7. 



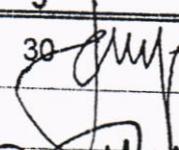
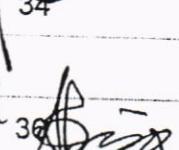
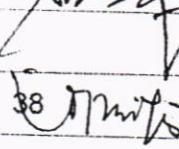
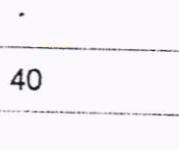
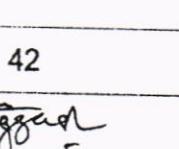
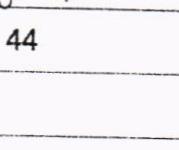
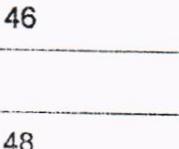
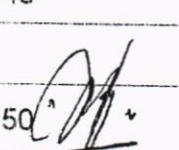
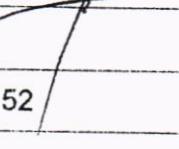
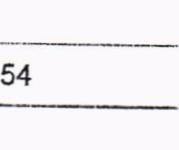
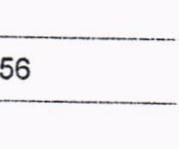
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

ACHMAD MUALIF
Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014**

HARI/TANGGAL : SENIN , 22 JUNI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

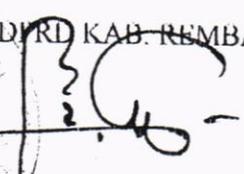
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Nur Effendi	STAB	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Henri Shopa	Kab. PUM	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Arju- Gantarto	Hukum	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Sri Wahyuni		12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Abdullah		13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. OFGNS. & KEPEGAWAIAN	Ind Suharnah	AKRAB	15
16	BAG. UMUM	Jennie	Bg. Umum	16
17	DPPKAD	SRI WATINI		17
18	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPEKTUR	18
19	BAPPEDA	HARI S	Bappeda	19
20	BPMPKB	Dwi Wahyuni K.	ka.	20
21	BKD	SUPARMIN		21
22	BKP & P4K	Dwi PURWANTO	Ka. Bada.	22
23	BPBD	SUHURSO	B	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	M. Rokhim	Kabid	24
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	sekret	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Nur Effendi	Disiplin	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Muhammad	Koordinator	27
28	DINTANHI IT	Gunawan		28

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO	SUYONO	Ka Dinas	30 
31	DINAS DUKCAPIL	M. Daenuri	Ka. dis	31 
32	DINSOSNAKERTRANS	H. WALUYO	KADIS	32 
33	DINBUDPARPORA	SUNARTO	Kadis	33 
34	DINAS ENERGI & SDM			34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Andreas Emy		35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	J. R. S.	Kadabg Su	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR KPPT	Sri Sugiyart.	Ka KPPT	38 
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Eini Saputra	Kab. Rangit	39 
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK. KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH	Sugga Sihombing	_____	43 
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR B'KK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	MUSTHOFA		50 
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB REMBANG			60 
61	B P N KAB. REMBANG	Saprihadi		61 
62	KANTOR PAJAJ.			62

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95		A WARTANG	TA FKS	95 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. ACHMAD MUALIF

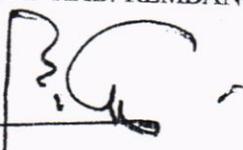
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014

HARI/TANGGAL : SENIN , 22 JUNI 2015
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	HERYONO	3
4	CAMAT SULANG	Agung Budis	4
5	CAMAT BULU	SUSMANANTORO	5
6	CAMAT PAMOTAN	U. Wiyono	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	Kusnardi	8
9	CAMAT LASEM	Kusni P	9
10	CAMAT PANCUR	Juhana	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	Mardiyanto	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

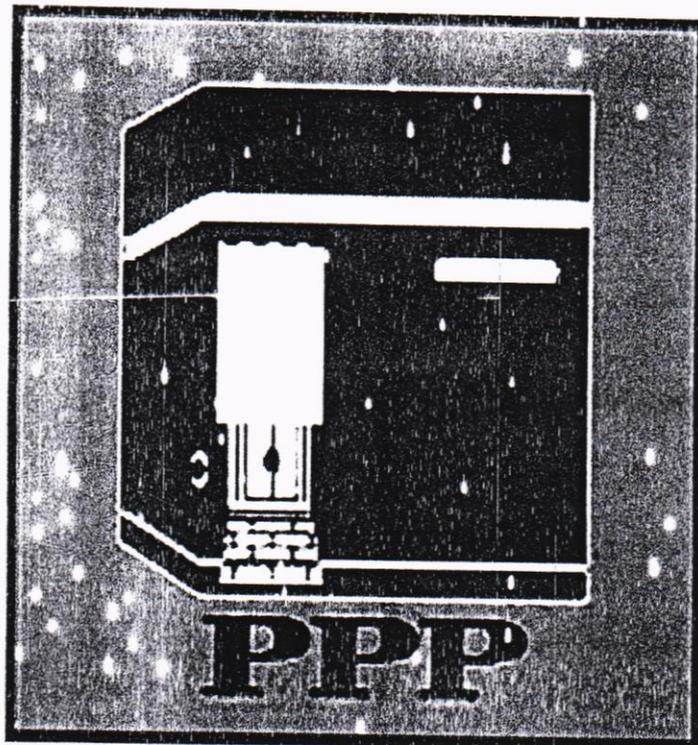

Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Hari : Rabu, Tanggal : 17 Juni 2015

Dibacakan oleh : HENRY PURWOKO, S.Pd.

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2014**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Wassolatu wassalamu 'Ala Rosulillah, Muhammad Ibnu Abdillah, wa 'ala Alihi, Washohbihi, Waman Walah. Amma Ba'du.

Yang karni hormati saudara Bupati,

Yang karni hormati :

- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara FORKOMPIMDA Kabupaten Rembang;
-
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- Kabupaten Rembang;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini, yang perbahagia.

Alhamdulillah Wasyukru Lillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, taufiq, dan hidayahNya, yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama hadir mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang ini, dalam keadaan sehat wal afiat. Amin...

Sholawat dan Salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing ummatnya, termasuk kita sekalian "*min al dzulumati ila al nuur*".

Mengawali Pandangan Umum ini, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa kepada seluruh masyarakat Rembang, yang Insya Allah akan kita laksanakan mulai besok pagi.

Marhaban Ya Ramadhan. Semoga pada bulan suci Ramadhan, dapat menjadikan instropeksi diri, dan menguatkan niat dan komitmen kita, untuk memperjuangkan kemaslahatan ummat, dan kemaslahatan masyarakat Rembang pada khususnya. Dan semoga lebih meningkatkan kualitas Iman dan Ihsan kita kepada Allah SWT.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Perkenankan kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan Pemandangan Umum, terhadap Raperda, Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014, beserta evaluasi, demi kemajuan Rembang yang akan datang.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Berkenaan dengan Pengantar Nota Keuangan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014, yang telah disampaikan oleh saudara Bupati, kami menyambut baik, dan mengapresiasi dari kinerja Pemkab Rembang, terutama dari target pendapatan daerah yang terealisasi 96,02 persen dari target yang ditentukan. Kedepan kami harap, Pemkab lebih memaksimalkan upaya yang kreatif dan Inovatif, untuk meningkatkan pendapatan daerah, Tanpa harus membebani kepentingan masyarakat umum. Dan kami, FPPP juga menekankan efisiensi dalam belanja daerah, khususnya pada belanja rutin.

Kemudian, Kami FPPP mengapresiasi program-program Pemkab Rembang Tahun 2014, yang Pro Rakyat, seperti Peningkatan Program Pertanian, terutama, Modernisasi dan alih teknologi pada Pertanian, sehingga lebih meningkatkan produktifitas pertanian, disamping itu, kami juga mengapresiasi program Pembangunan Infrastruktur, Perikanan dan Kelautan, serta Pendidikan dan Kesehatan.

Kedepan, agar program-program yang baik ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan, terutama perlindungan terhadap petani dan nelayan, harus menjadi perhatian khusus.

Kami FPPP juga berharap kepada Pemkab, untuk lebih memaksimalkan pembangunan potensi wisata dikabupaten Rembang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Karena, selain meningkatkan PAD, wisata juga memberikan multi player efek yang besar pada masyarakat, dan menunjang tumbuhnya industri-industri kecil dan industri kreatif dimasyarakat.

Berkaitan tentang Realisasi Silpa Tahun 2014, sebesar 209.583.528.065,55 yang lebih tinggi dibanding tahun 2013 sebesar 167.186.629.790,34. Hal ini, harus menjadi perhatian serius kita semua, karena kami memandang, dengan peningkatan silpa ini, berarti ada beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan atau kurang maksimal, dan juga adanya perencanaan yang kurang tepat, sehingga, realisasinya tidak sesuai dengan prediksi. Kedepan, kami berharap, silpa dapat ditekan seminimal mungkin.

Dan kami meminta kepada instansi atau dinas terkait, untuk memperbaiki proses perencanaan program, yang disesuaikan dengan arah kebijakan, pembangunan rembang, diharapkan, dalam menuangkan program dan kegiatan kedepan, tidak didasari pemikiran untuk menghabiskan anggaran saja. Tetapi, memiliki perencanaan yang baik, jelas, terukur dan berkualitas. diselaraskan dengan potensi daerah dan kearifan lokal. Disamping itu, dalam pelaksanaan setiap program / kegiatan, juga tetap memperhatikan kualitas dan mutu, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Saudara Bupati dan hadirin sidang dewan yang saya hormati.

Selanjutnya, perkenankanlah pada kesempatan hari ini, kami atas nama Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan masukan dan pertanyaan terhadap APBD tahun 2015.

1. Terkait dengan keresahan beberapa pihak, tentang program dan kegiatan APBD tahun 2015, ada yang sampai bulan juni ini, belum bisa dilaksanakan. terutama program infrastruktur, kami meminta kepada saudara Bupati, untuk menjelaskan alasannya agar kita dan masyarakat rembang mengetahui sebabnya, hal ini perlu kami pertanyakan, agar masyarakat tahu permasalahan yang sebenarnya, dan tidak mendapat penjelasan secara sepotong-sepotong dari pihak-pihak tertentu, yang tidak mengetahui secara utuh. Juga agar tidak menjadi fitnah, dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Sekaligus sebagai wujud tanggungjawab kami sebagai anggota Legislatif, untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap eksekutif. Dan kami FPPP meminta kepada eksekutif, untuk segera mencari solusi yang tepat, agar program-program dan kegiatan APBD 2015 yang sampai saat ini belum terlaksana, segera dapat direalisasikan. Sehingga program dapat selesai tepat waktu, tepat guna, dan bermanfaat bagi masyarakat rembang, juga menekan silpa pada tahun 2015.
2. Kami meminta kepada saudara Bupati, untuk segera menyusun, dan mengajukan rancangan KUA / PPAS APBD Perubahan 2015, untuk segera ditindak lanjuti dan dilakukan pembahasan.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Semoga kritikan dan saran, menjadikan Rembang kedepan yang lebih baik. Dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wal Afwu minkum, Wallahul Muwafiq, ila Aqwamiṯ Thoriq,

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, Rabu, 17 Juni 2015

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



SUGIHARTO

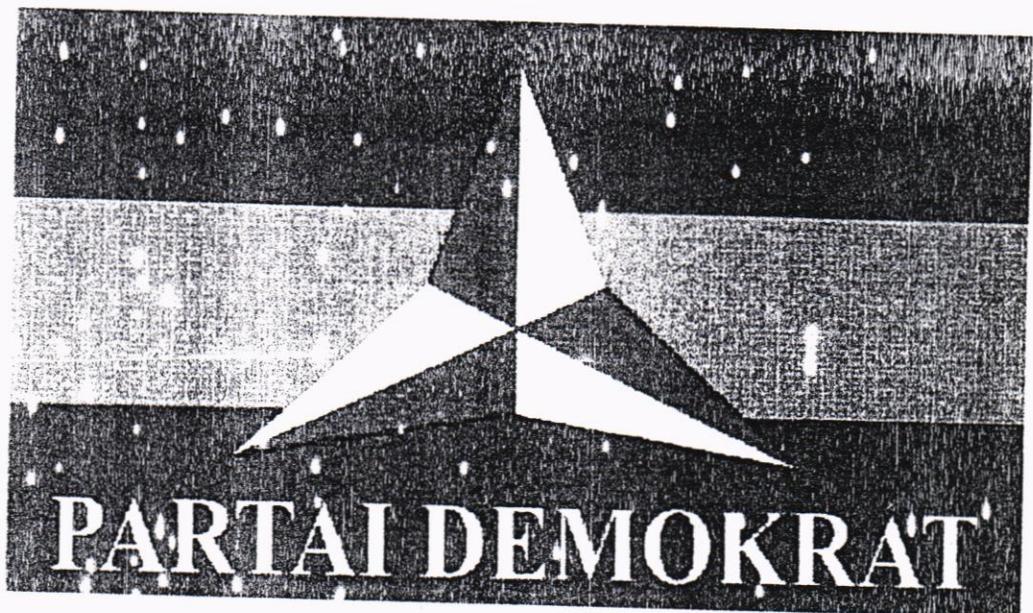


Sekretaris,



ZAIMUL UMAM NS.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2014**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 22 JUNI 2015

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, ST.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPEERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN 2014

SENIN, 22 JUNI 2015

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, ST.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Saudara Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Syukur alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Bahwa pagi hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayahNya berupa kesehatan dan

kenikmatan hidup sehingga kita masih dapat bertemu dan bertatap muka dalam rapat paripurna RAPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Kami Fraksi Demokrat tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan bagi yang melaksanakannya, dan marilah kita menjalankan puasa inidengan penuh iman dan semoga dibulan yang suci ini kita mendapatkan kelimpahan berkah dari Allah SWT dan dosa – dosa kita diampuni, amiin.

Elupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Dimana pada akhir tahun ini akan diadakan PILKADA serentak dibeberapa daerah di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Rembang, kami berharap kepada semua pihak supaya menjaga kondusifitas dan menahan diri supaya jangan terjadi gesekan – gesekan di masyarakat dan hanya sedikit orang yang bisa mengambil sisi positifnya dari pesta besar ini dan marilah kita menjaga kondusifitas di Kabupaten yang kita cintai ini.

Di bulan ramadhan ini perekonomian kita sedang lesu – lesunya dan harga sembako yang melambung tinggi, daya beli masyarakat menurun dimana masih banyak masyarakat kita dibawah garis kemiskinan yang tidak mampu membeli kebutuhan sehari hari, Kami mengharapkan Pemerintah bisa membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya supaya bisa hidup layak.

Di bidang infrastruktur khususnya jalan yang menghubungkan antar kecamatan dan antar desa sudah banyak yang rusak sehingga menghambat roda perekonomian masyarakat, Kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang bisa membuat solusi yang baik ke depan .

Di bidang pasar khususnya pasar Rembang kota dimana pada pagi hari hampir bisa dipastikan kemacetan karena sepanjang jalan sisi utara, barat dan selatan dipenuhi pedagang dan parkir yang tidak tertata dengan baik sehingga kurang rapi dan terkesan semrawut, masyarakat jadi malas berbelanja untuk kebutuhannya sehari – hari.

Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Perlu Kami sampaikan pula agar Pemerintah Kabupaten Rembang dapat melaksanakan program – program pembangunan yang terstruktur dan konperhensif, melanjutkan pilar – pilar pembangunan yang lebih sistematis, berdaya guna bagi masyarakat ditahun – tahun selanjutnya, capaian – capaian kerja yang sudah baik agar di pertahankan dan yang masih perlu pembenahan agar ditingkatkan ditahun – tahun yang akan datang.

Dan kami berharap agar para PNS yang memenuhi syarat untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa agar diberi perlindungan hukum supaya tidak takut terjerat hukum dikemudian hari.

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

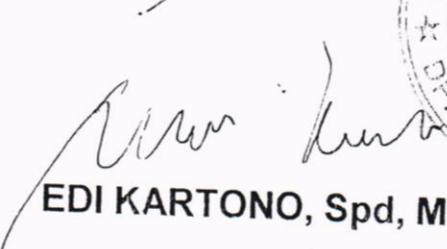
Rembang, 22 juni 2015

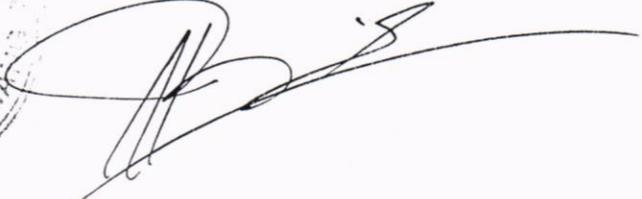
FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS




EDI KARTONO, Spd, MH.


Hj. HIKMAH PURNAMAWATI, SH.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APED)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014**

disampaikan oleh Muhammad Asnawi SPd.i

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Rabu 17 Juni 2015/Kamis 18 Juni 2015

Yang terhormat Sdr. Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Agama

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan/Kepala Kesatuan TNI-POLRI;

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang serta para

Camat se-Kabupaten Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM serta Undangan sekalian yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum FPKB ini, Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah – Nya sehingga pada hari ini, rabu 17 juni 2015, kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupateng Rembang Tahun Anggaran 2014 dalam keadaan sehat wal afiat, sejahtera lahir dan batin tanpa suatu halangan apapun.

Di tempat yang sama Pemandangan Umum terhadap LPJ APBD 2014 pada tanggal 23 Juni 2014, artinya tahun ini kita lebih cepat dibanding tahun lalu. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan Ridho dari Allah SWT.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka bumi, sehingga dapat membedakan yang benar dan yang salah guna pencerahan umat manusia dari situasi kegelapan menuju jalan yang di ridhoi oleh-Nya

Sidang Dewan dan hadirin yang berbalia

Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Rembang mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Dewan yang berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi PKB untuk menyampaikan pandangan umum fraksi.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati atas Penyampaian Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. Tak lupa pula, Fraksi kami menyampaikan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang mamou menjaga ketertiban dan stabiitas bermasyarakat dan berpemerintahan.

Bahwa laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2014 Saudara Bupati adalah bagian dari bentuk amanahnya seorang pemimpin dan pejabat publik. Melalui laporan pertanggungjawaban iri Saudara Bupati telah menyampaikan kewajibannya untuk menyampaikan secara tertulis kepada masyarakat Rembang. Laporan inilah yang juga menjadi bahan auditor atau inspektorat untuk menilai kelayakan laporan pertanggungjawabannya. Dari laporan ini dapat dilihat kinerja Pemkab Rembang kurun tahun 2013 / 2014

Dalam APBD 2014 ini kami juga prihatin, karena ada kawan seprofesi, baik birokrat ataupun anggota DPRD yang tersandung dengan persoalan hukum. Sejatinya jika kita bersama sama dan selalu mengingatkan, tidak terlalu berebut dengan kue APBD yang didistribusikan kepada masvarakat (bukan mendahulukan konstituen/pendukung saja) tidak akan terjadi hal hal seperti ini. Agar kita selalu berpijak pada reglasi yang berlaku

Dalam pandangan umum kami terhadap RAPBD 2014 yang kami sampaikan pada Hari ini sekedar ingin mengingatkan kepada semua pihak, khususnya pemangku kebijakan dan *stakeholders* di kabupaten Rembang untuk memahami dan mencermati kebiasaan yang terjadi pada RAPBD yang dibahas pada masa akhir jabatan legislatif dan kepala daerah. Agar APBD 2014 yang akan dibahas dapat tetap memenuhi regulasinya.

Penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD telah diatur sebagaimana dalam Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentang Penyusunan APBD tahun anggaran 2014, terutama untuk sinkronisasi kebijakan Pemkab dengan Kebijakan Pemerintah. Hal ini untuk mengeliminasi kesenjangan program karena tidak adanya GBHN.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah "Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan", dengan sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen;
2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen;
3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen; dan
4. Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.

Memperhatikan sasaran utama tersebut, ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan
6. Infrastruktur
7. iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energy
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi; dan
12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat.

Sekali lagi bahwa APBD yang dibahas menjelang akhir masa jabatan selalu sarat dengan konflik interest. Demikian halnya yang terjadi menjelang pilkada, akan senantiasa ada konflik interest, yaitu penyalahgunaan wewenang untuk tujuan konsolidasi bagi mereka yang memiliki kewenangan. Baik untuk mobilisasi maupun konsolidasi dukungan sehingga melupakan prioritas utama seperti reformasi birokrasi dan kenyamanan kerja para pelayan masyarakat.

Perkenankan kami juga menyampaikan : Marhaban Ya Ramadhan

Alhamdulillah kita ditakdirkan masih bisa bertemu dalam Ramadhan 1436 H. Masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri melalui media "pelatihan laten" yang disediakan oleh Allah SWT bagi hamba hambaNya. Yaitu pelatihan selama sebulan penuh dari 12 bulan yang lain. Adakah kita tak mampu mengevaluasi semua pilihan ternadap sikap dan kebijakan yang telah diambil selama ini ??

Kita patut belajar dari keberanian pemerintah pusat dalam Konferensi Asia Afrika yang secara lantang menyuarakan aspek negatif "penjajahan" IMF yang selalu merugikan negara berkembang dan menguntungkan IMF. Kita juga bisa belajar dari pemerintah pusat yang berani menunda kesepakatan dengan Freeport yang harus diakui tidak menguntungkan Republik Indonesia juga rakyatnya. Keberanian mengkaji ulang pengelolaan tambang yang selama ini tidak memberi dampak terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar pertambangan

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Transparan sesuai dengan Prinsip Good Governance, Dan dengan Mendasarkan Ketentuan Pasal 184 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali di rubah terakhir dengan undang undang nomor 23 tahun 2014, Bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Bertanggungjawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Susunan materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang meliputi 4 (empat) hal yaitu terdiri dari;

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca.
3. Laporan Arus Kas (LAK); dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Selanjutnya perlu dipahami bersama bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 81 Undang Undang Nomer 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah, serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, Kepala Daerah Bertanggung jawab atas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan daerah dan perlu juga harus dipahami bersama, Ketentuan Perundang undangan tersebut diatas memberi amanat kepada Bupati untuk menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa Oleh BPK, Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dari ketentuan ini apakah hal-hal di atas sudah dipenuhi oleh Sdr. Bupati ?

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat ;

Sejalan dengan Pembahasan Nota Bupati Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014, yang terdiri atas

1. Pendapatan :

Anggaran	Rp. 1.384.690.314.469,00
Realisasi	Rp. 1.329.587.756.593,27 (96,02%)

2. Belanja

Anggaran	Rp. 1.540.612.631.176,00
Realiasasi Anggaran	Rp. 1.275.908.646.560,00 (82,82%)

3. Pebiayaan

Realisasi

1. PENERIMAAN	Rp. 167.066.868.874,34
2. FENGELUARAN	Rp. 11.162.450.842,00
Pembiayaan Netto sebesar	Rp. 155.904.418.032,34

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 2014 Rp. 209.583.528.065,55

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat ;

Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2013, Perkenankanlah Fraksi PKB DPRD kabupaten Rembang, Menyampaikan Pandangan dan Pendapat Fraksi Untuk Mendapatkan Jawaban dari saudara Bupati antara lain sebagai berikut :

- 1 Realisasi Belanja yang hanya terserap sebesar 82,82% menunjukkan perencanaan pembangunan yang kurang matang. Apalagi jika ditambah dengan perilaku yang sama

pada APBD tahun 2015 yang hingga bulan ini masih sangat minim terdistribusi, kecuali soal soal sosialisasi dan perjalanan dinas dalam kota yang serapannya luar biasa.

2. Sekali lagi, Fraksi PKB meminta penjelasan Saudara Bupati terhadap Realisasi Bagian Laba dari BUMD Perusahaan dan atau Holding Company yang belum maksimal, apakah karena keadaan atau kemampuan Perusahaan Daerah dan atau Holding Company dalam mencetak Laba sangat kecil atau disebabkan kondisi kemampuan managerial yang lemah atau sebab-sebab yang lain.
3. Juga, penjelasan yang solutif atas kisruh Pelabuhan yang sejatinya jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendapatan yang sangat potensial.
4. Lebih jauh kami meminta penjelasan tentang tentang SKPD atau Pejabat SKPD yang tidak mau menjalankan kewajiban untuk melaksanakan Perda APBD 2015. Seorang pemimoin yang baik diukur dari seberapa kuat yang bersangkutan mampu memberikan solusi atas masalah masalah yang dihadapi bawahannya.
5. Terhadap Keberadaan café-café illegal di tepi jalan, Fraksi PKB meminta kepada Saudara Bupati menertibkannya. Hal ini penting agar tak terjadi anggapan bahwa pemkab Rembang hanya menertibkannya menjelang puasa. Kami khawatir hal tersebut dipahami hanya dilarang pada bulan Romadhon, artinya jika di luar bulan Ramadan café-café tersebut boleh dibuka.
6. FPKB Minta Penjelasan pada Pemkab Rembang dalam hal ini Sdr Bupati terkait dengan direktur PDAM Rembang mengapa sampai hari ini belum juga diangkat direktur yang devinitif . apakah dibenarkan oleh Peraturan dimana Plt terjadi 2x, dan apa alasan yang mendasar pengangkatan Direktur PDAM di tunda – tunda.

Fraksi kami melihat pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 menjadi "lagu lama" terdapat silpa yang cukup besar. Yaitu sebesar 209,58 milyar atau sebesar 15,t% dari APBD.

Rapat Dewan yang Rapat Dewan yang terhormat ;

Demikian Pandangan Umum FPKB yang dapat kami sampaikan. Terimah kasih atas kesabaran mengikuti sidang ini, dan apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Sebagai penutup dalam pandangan umum ini mari kita berpilkada secara sportif. Semoga Allah Subhanahu Wata'alla selalu memberikan bimbingan serta petunjuk-Nya kepada kita sekalian. Aamiin.

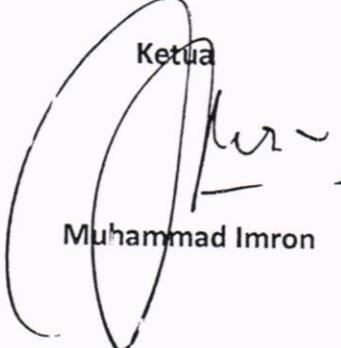
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq, Nasrun minallah.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN RMBANG

Ketua

Muhammad Imron



Sekretaris

Ilyas



FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Pdt Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan agenda mampu menghadirkan Pemandangan Umum Fraksi PDIP NASDEM terkait LKPJ Bupati Kabupaten Rembang T.A 2014. Kami tidak lupa mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan 1436 H.

Dalam kesempatan yang berharga kali ini iijinkan kami dari Fraksi PDIP Nasdem memberikan beberapa hal yang menjadi catatan kami dalam menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban saudara Bupati.

Yang pertama soal Dinas Pendidikan, kami menghimbau kepada Ka Dinas Pendidikan untuk memperhatikan ada beberapa masalah yang ada di Sekolah – sekolah yang masih dijumpai adanya iuran – iuran yang kami anggap liar dan itu sangat meresahkan dan memberatkan orang tua siswa. Dimana iuran tersebut dibebankan kepada siswa dengan alasan tertentu dan diembel – embeli kata minimal. Kami menganggap sudah tidak iuran sukarela tapi sudah pemaksaan, mohon jadi perhatian Bupati dalam hal ini Ka Dinas Pendidikan.

Kemudian yang kedua , kami mengusulkan kepada saudara Bupati dalam hal ini Dinas Kesehatan supaya tiap desa diberikan alat Fogging agar ketika terjadi kasus Demam Berdarah warga bisa langsung menindak / memfogging sendiri sebagai langkah awal penanggulangan sambil menunggu pihak DinKes untuk turun lapangan.

Kemudian untuk program BPJS yang cara pembayarannya yang melalui auto debet, bagaimana dengan warga desa yang tidak tahu menahu tentang apa itu Auto Debet, apa itu bank. Bagaimana kalau untuk pembayaran BPJS ini bisa dilakukan dengan cara kolektif tingkat desa, ini untuk mengantisipasi warga yang kurang tahu proses Auto Debet seperti itu.

Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kami memohon peningkatan sarana dan prasarana medis di IGD BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Soetrasno.

Dengan adanya antrian rawat yang terlalu lama kami berharap kepada BLUD RSUD Dr. Soetrasno untuk segera mencari solusi agar pasien bisa segera mendapat perawatan.

Kami juga meminta penjelasan adanya pungutan terhadap fasilitas ambulance terhadap pasien yang dirujuk ke RS lain.

Untuk yang ketiga, kami ingin saudara Bupati dan Pemkab dalam hal ini Dinas Indakop melakukan control terhadap harga barang kebutuhan pokok yang selama ramadhan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan kami menghimbau Dinas Indakop untuk dapat melakukan langkah – langkah supaya dapat menekan harga barang kebutuhan pokok dimasyarakat. Melalui operasi pasar, atau melaksanakan pasar murah dan lain sebagainya.

Yang ke empat, Kami mohon penjelasan saudara Bupati atas penundaan pembangunan jembatan Jetty di TPI Sarang. Dan pembangunan Pasar Sarang.

Yang terakhir, Untuk pembangunan embung – embung kami minta untuk tempat dan manfaat dapat di perhatikan sebelum pembangunannya supaya dapat tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena akan sangat sia- sia embung di bangun tapi masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya. Dan ini sangat kami sayangkan

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini dibuat, semoga ada guna dan manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Billahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

MERDEKA!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KETUA


JASMANI

SEKRETARIS


ALI ARCHAM ST

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014**



REMBANG, 22 JUNI 2015

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014

Disampaikan oleh H.CHASANUDDIN
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin 22 Juni 2015

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat. Bupati Rembang

Yang kami hormati Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;

Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami hormati Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Para Pejabat dilingkuangan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, ini kami tak lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur Kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan KaruniaNYA sehingga sampai saat ini kebersamaan semua jajaran Eksekutif dan Legislatif dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang bisa

berjalan dengan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Di bulan Ramadhan yang Suci ini, Kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya senantiasa mengajak kepada seluruh jajaran Pemkab Rembang untuk senantiasa menegakkan "*Amar ma'ruf Nahi munkar*", dengan meningkatkan kinerja dan meningkatkan mutu pelayanan kepada segenap masyarakat Rembang, sehingga bisa menciptakan kepastian hukum dan rasa nyaman bagi segenap masyarakat dan rakyat Rembang yang kita cintai ini.

Sehubungan dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 Fraksi Gerindra mendasar dari kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang akan memberikan beberapa catatan-catatan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengapresiasi atas pencapaian target pendapatan yang mencapai 96,02 % ,direncana pendapatan daerah sebesar **Rp.1.384.690.314.469 ,- (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan puluh Empat Milyard Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)**. dapat direalisasi sebesar **Rp.1.329.587.756.593,37,- (Satu Triliun Tiga Ratus Dua puluh Sembilan Milyard Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah)**.

2. Sehubungan dengan pengoptimalan potensi pendapatan dari pos pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana sejak Tahun Anggaran Tahun 2011 hingga Tahun Anggaran 2014 pengoptimalan kinerja BUMD, BUMD yang ada dan terutama PT.RBSJ tidak pernah serius dilaksanakan Pemkab Rembang, buktinya Pemkab Rembang selaku pemegang saham mayoritas PT.RBSJ tidak pernah mau melaksanakan RUPS, pada hal kita semua tahu lewat RUPS lah pintu masuk untuk mendapatkan Deviden dapat di Realisasi.
3. Terhadap Realisasi belanja yang dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur kinerja Pemkab Rembang, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya meminta penjelasan atas Realisasi belanja yang hanya 82,82 %.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 22 Juni 2015

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG


HERI KURNIAWAN, SE
Ketua


PUJI SANTOSO, SP. MH.
Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

atas
Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD TA 2014



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas
Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang

Hari Rabu, 17 Juni 2015

Juru Bicara : GATOT PAERAN, SH, MSi.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Assisten Sekda dan Kepala Bagian di lingkungan SETDA Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Camat dan semua hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan umum ini, mari memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

DPRD memiliki fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran (kewenangan dalam hal menyusun APBD) dan fungsi pengawasan (kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah). Dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini DPRD melaksanakan 3 fungsi itu sekaligus.

Secara umum pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang TA 2014 telah berjalan dengan baik dan kami sangat berterima kasih terhadap semua pihak dan seluruh elemen masyarakat maupun jajaran pemerintahan yang telah bekerja sama untuk mewujudkan hal ini.

Dari sisi pendapatan belum memenuhi target penerimaan yakni baru mencapai 96,02 %. Ini jauh lebih kecil daripada pendapatan pada TA 2013 sebesar 99,9 %. Dari hasil audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2014, pendapatan asli daerah Kabupaten Rembang masih bisa

dipacu peningkatannya lebih dari 10 % pencapaian TA 2014. Ini perlu koreksi terutama kepada SKPD yang bertugas memasukkan pendapatan asli daerah dan pada tahun ini kita berharap bisa melampaui target pendapatan, terutama pendapatan asli daerah. Untuk itu, kami sangat mendukung upaya DPPKAD maupun SKPD yang lain untuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah, dengan tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat.

Dari sisi belanja malah lebih rendah lagi penyerapannya. Dari rencana hanya terealisasi hanya 82,82 % saja. Ini berarti menurun dibanding realisasi belanja pada TA 2013 lalu yang mencapai 85 % lebih.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kegiatan-kegiatan dalam APBD TA 2014 telah dilaksanakan dengan tolok ukur yang ada. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan kami dan menjadi sorotan publik karena belum banyak meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain:

- Di pasar, yang sehari-hari menjadi tempat berbelanja segala kebutuhan masyarakat, pemerintah belum bisa mengendalikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat. Harga-harga terus melambung tak terkendali.
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan masih rendah penyerapannya, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati hasil pembangunan seperti infra struktur dll. secara maksimal.
- Dikalangan petani dan nelayan, pemerintah belum bisa memberi proteksi (perlindungan) atas tekanan dari pemilik modal yang sangat merugikan petani dan nelayan.
- Pemerintah Kabupaten Rembang tidak punya keberanian untuk menekan badan usaha milik daerah PT RBSJ, agar segera melakukan RUPS.
- Pemerintah Kabupaten Rembang sangat lemah dalam pengendalian dan monitoring terhadap pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang.
- Lebih jauh lagi, apabila kita menyimak hasil audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2014

maka akan kita temui kelemahan dan kekurangan yang lebih banyak lagi

Rapat dewan dan hadirin yang terhormat,

Menjelang masuk bulan suci Ramadhan 1436 Hijriah besok pagi, perkenankanlah kami mengucapkan “Marhaban Ya Ramadhan-Selamat datang Bulan Ramadhan”, semoga kita selalu mendapat kekuatan dan pertolongan dari Allah SWT. untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya.

Akhirnya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Amien.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

H. ISMARI, SH



Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2014

Dibacakan Oleh : Sukarma'in

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Plt. Bupati/Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2014 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan penjelasan Bupati pada Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang T.A 2015 beserta lampiran-lampirannya, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal :

1. Tentang Investasi Jangka Panjang pada pos Investasi Permanen. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan halaman 62 dipaparkan bahwa dalam laporan audited PT. RBSJ, pada aset lain-lain, terdapat item piutang macet sebesar Rp. 2.645.183.882,40 dan investasi tebu sebesar Rp. 9.735.647.360,00 pada PT SAB yang statusnya dalam proses penyelesaian oleh penegak hukum dan belum dilakukan eksekusi. Mohon penjelasan sejauh mana proses hukum itu berjalan, juga kemungkinan pengembalian investasi itu, seinisal dengan penyitaan aset-aset yang dimiliki oleh PT. SAB.
2. Tentang Dana Alokasi Khusus. Menurut pemahaman kami, pencantuman besaran Dana Alokasi Khusus dalam APBD 2014 sudah bersifat definitif. Proses pencairannya pun melalui proses verifikasi yang cukup ketat. Mohon penjelasan terkait realisasi anggaran yang hanya mencapai 75 % dari perencanaan.
3. Tentang Belanja Pegawai. Pada Tambahan Penghasilan PNS pencapaian realisasi hanya 63,75 % atau terdapat selisih antara rencana dengan realisasi sebesar Rp. 131.541.889.695.00. Apakah ini bentuk dari kekeliruan perencanaan penganggaran ?? Kemudian terkait realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah (sebesar 67,4 %) dan Insentif Pemungutan Restribusi Daerah yang hanya sebesar 48,86 %, sementara pencapaian Pendapatan Pajak Daerah melebihi target yakni sebesar 117,75 % dan Pendapatan Restribusi Daerah sebesar 106,91 %. Menurut kami biaya insentif pemungutan pajak/retribusi berbanding lurus dengan besarnya target pencapaian pendapatan pajak atau restribusi daerah. Sekali lagi,

apakah ini kekeliruan dalam perencanaan penganggaran atau terdapat unsur kesengajaan. Mohon dapat dijelaskan secara detil dan terbuka.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Kami mengharapkan pembahasan Raperda ini dengan memperhatikan sisi kualitatif (bukan semata pencapaian secara kuantitatif), sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang positif untuk menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan dengan optimal.

Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

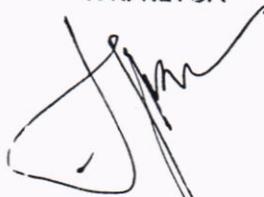
Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 17 Juni 2015

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

WK. KETUA



SUKARMAIN

SEKRETARIS



SAHNINGSIH, SE



JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
KABUPATEN REMBANG



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.**

Yang saya hormati, Sdr Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Muspida Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pidato jawaban kami atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, terlebih dulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan dan tak kurang suatu apa.

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.384.690.314.469,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.329.587.756.593,27 atau 96,02%. Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.540.612.631.176,00 realisasinya adalah sebesar Rp. 1.275.908.646.560,06 atau 82,82 % sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.167.086.316.707,00 realisasinya sebesar Rp.167.066.868.874,34 atau 99,99 % dan Pengeluaran Pembiayaan

yang direncanakan sebesar Rp.11.164.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.11.162.450.842,00 atau 99,99 %

Selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan-catatan yang berkembang dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPF/D Kabupaten Rembang, berikut saya sampaikan jawaban dan/atau klarifikasinya :

1. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN

MENGENAI PENEKANAN TENTANG EFISIENSI BELANJA DAERAH, KHUSUSNYA PADA BELANJA RUTIN DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT :

Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas masukan, saran dan apresiasi serta koreksi Fraksi PPP, dapat dijelaskan bahwa belanja rutin merupakan belanja penunjang kelancaran kegiatan pada SKPD sehingga keseluruhan realisasi atas belanja tersebut merupakan wujud kelangsungan pelaksanaan kegiatan pada SKPD dan dalam rangka mewujudkan efisiensi anggaran belanja rutin akan kami tindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah konkret gerakan penghematan belanja dimaksud.

TENTANG PEMAKSIMALAN PEMBANGUNAN POTENSI WISATA DI KABUPATEN REMBANG DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

❖ Upaya Fisik

Bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Rembang di dalam pengembangan daya tarik wisata tidak hanya melalui dana APBD tapi juga dengan upaya lain baik melalui APBD Provinsi, APBN maupun diupayakan untuk kerjasama dengan investor.

❖ Upaya Non Fisik

Bahwa dalam program non fisik juga dilakukan dalam meningkatkan sadar wisata pada masyarakat melalui sbb:

- Peningkatan SDM Pokdarwis (Pokja pada wisata) pada desa yang mempunyai embrio daya tarik wisata
- Bersinergi dengan SKPD terkait dengan program kepariwisataan dalam upaya meningkatkan sadar wisata pada masyarakat
- Oleh karena Kabupaten Rembang kaya akan potensi budaya dan peninggalan kuno maka upaya dalam melakukan langkah mendapatkan wisatawan juga dilakukan yakni melalui pelaksanaan event-event sebagai daya tarik wisatawan.

TENTANG SILPA TAHUN ANGGARAN 2014 YANG LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN SILPA TAHUN ANGGARAN 2013 (sekaligus menjawab Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Kebangkitan Bangsa)

Dapat Kami Jelaskan sebagai berikut :

SILPA sebesar Rp. 209.583.528.065,55 tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain :

Adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang atau kegiatan tersebut berada di APBD Perubahan yang mengakibatkan proses waktu lelang tidak mencukupi, dan termasuk dana transfer yang sudah jelas peruntukannya tetapi belum bisa dilaksanakan terkait Juklak Juknis yang terlambat sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Secara makro komponen SILPA sebesar Rp. 209.583.528.065,55 antara lain :

1. Pelampauan Penerimaan PAD ;
2. Pelampauan Penerimaan DBH Pajak dari Pemerintah Provinsi ;
3. Penghematan belanja.

Dengan memperhatikan komponen SILPA tersebut, maka secara makro hasil pelaksanaan kegiatan telah tercapai sehingga terjadi efisiensi belanja serta peningkatan kinerja pada beberapa SKPD.

PERTANYAAN TERKAIT PROGRAM KEGIATAN APBD TA 2015 YANG SAMPAI BULAN JUNI BELUM DILAKSANAKAN, TERUTAMA INFRASTRUKTUR (sekaligus menjawab Fraksi Demokrat dan Fraksi Karya Sejahtera)

Dapat kami jelaskan bahwa kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai tahapan - tahapan yang ada. Saat ini kami sedang dan terus bekerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015.

2. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT

Terima kasih. atas apresiasi Fraksi Partai Demokrat terhadap usaha Pemerintah Daerah dalam mencapai segala prestasi dan keberhasilan sehingga dapat memotivasi dan mengoptimalkan kinerja SKPD.

TENTANG HARGA HARGA KEBUTUHAN POKOK YANG MELAMBUNG TINGGI (sekaligus menjawab Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Partai PDI Perjuangan NASDEM)

Dapat kami jelaskan bahwa kondisi nasional yang belum stabil karena kenaikan bahan bakar minyak di tahun 2015, di tambah dengan budaya masyarakat saat bulan Ramadhan dengan kecenderungan belanja yang tinggi untuk kebutuhan pokok menciptakan sentimen pasar yang naik. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah secara berkala melakukan

operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok berikut alur distribusi bahan – bahan yang dibutuhkan masyarakat jangan sampai terjadi minim stock atau kehabisan stock. Juga diadakannya Pasar Murah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.

TENTANG KETERTIBAN DI PASAR REMBANG TERKAIT KEMACETAN JALAN DAN TATA TEMPAT PEDAGANG DAN PARKIR

Dapat Kami Jelaskan sebagai berikut :

Bahwa terkait kemacetan jalan dan parkir di Pasar Rembang diindikasikan:

Kondisi pasar kota Rembang tidak layak/kurang representatif, karena luas pasar yang 15.046 M² tidak dapat menampung sebanyak 1.547 pedagang, apalagi hal ini diperburuk dengan adanya kebakaran yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan langkah – langkah yang perlu diambil sebagai berikut:

- a) Pedagang yang ada di luar pasar/badan pasar diarahkan masuk ke dalam pasar.
- b) Penataan parkir di lingkungan pasar khusus untuk roda dua diperbolehkan hanya 1 shaf, pembuatan tempat parkir baru di depan pagar PT. Djarum, Bekas kantor BKK di dalam pasar.
- c) Penataan arus lalu lintas di sekitar pasar, dengan Pemasangan rambu satu arah dan larangan bongkar barang di sekitar pasar untuk pagi hari mulai jam 06.00 s/d 14.00 WIB.
- d) Pengaturan / penertiban becak/dokar.
- e) Ke depan diperlukan pembangunan pasar kota Rembang yang lebih Representatif atau dialihkan di lokasi yang lain.
- f) Untuk pasar Pamotan setiap hari Selasa telah ditempatkan petugas dari Dinhubkominfo Kab. Rembang untuk mengatur kelancaran lalu lintas.

3. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KURANG MATANG, SEHINGGA BELANJA HANYA TERSERAP 82,82% DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT : (sekaligus menjawab fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya)

Penyerapan belanja daerah sebesar 82,82 %, Hal ini karena ada beberapa hal yang mempengaruhi:

1. Adanya Proses lelang yang gagal di beberapa SKPD, sehingga waktu yang tersedia tidak cukup untuk pelaksanaan kegiatan
2. Keterlambatan penyampaian Juklak/Juknis DAK Bidang Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan R.I sehingga waktu pelaksanaannya tidak mencukupi

PERTANYAAN TERHADAP LABA BUMD YANG BELUM MAKSIMAL

Akan kami perhatikan dan kami lakukan pengendalian resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah terkait dengan BUMD.

TENTANG PELABUHAN TANJUNG BONANG (sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Karya Sejahtera)

Dapat Kami Jelaskan sebagai berikut :

- a) Permasalahan di Pelabuhan Tanjung Bonang secara keseluruhan saat ini dalam proses penyelesaian, baik melalui PANSUS DPRD Kabupaten Rembang, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pihak Investor dan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- b) Terkait dengan RIP dan Ijin Pengembangan dan Ijin Operasional.
 1. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, yang mempunyai kewenangan mengajukan RIP ijin Pembangunan Pelabuhan, Ijin Operasional adalah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang.
 2. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Kp. 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Pelabuhan Rembang Terminal Sluke/Tanjung Bonang adalah Pelabuhan Pengumpan Regional, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Kewenangan Penetapan RIP adalah Gubernur Jawa Tengah setelah mendapatkan Rekomendasi Bupati Rembang.
 3. Rencana Induk Pelabuhan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke/Tanjung Bonang sudah digunakan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang kepada Gubernur Jawa Tengah Tahun 2014 dan sedang dalam proses pembahasan oleh Tim yang terdiri dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan dijadwalkan selesai tahun 2015.
 4. Pemberian Ijin Pengembangan dan Ijin Operasional Pelabuhan Rembang Terminal Sluke / Pelabuhan Tanjung Bonang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 adalah Kewenangan Gubernur Jawa Tengah, dan ijin tersebut sudah diajukan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang kepada Gubernur Jawa Tengah dan saat ini dalam proses pembahasan oleh Tim bersamaan dengan Pembahasan RIP.
- c) Kegiatan Operasional Pelabuhan Rembang Terminal Sluke/Pelabuhan Tanjung Bonang berdasarkan keputusan rapat di Kementerian Perhubungan RI, Tanggal 28 November 2014, Rapat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 8 Januari 2015, Rapat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Tanggal 9 April 2015, rapat di Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 20 Maret 2015 dan rapat di Kabupaten Rembang, Tanggal 29 Mei 2015, memutuskan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke tetap beroperasi dan diselenggarakan oleh

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014.

d) Terkait Pendapatan.

Tanah Pelabuhan tersebut diperoleh dari Investor dan Di HPL kan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2013.

Berdasarkan LHP BPK RI tanggal 2 April 2015, Nomor 04B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2015, Tanggal 02 April 2015, Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Rembang TA.2014, bahwa untuk saat ini peluang satu-satunya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dari Pelabuhan adalah kepemilikan tanah HPL seluas 81.616 m² milik Pemerintah kabupaten Rembang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah pemanfaatan lahan yang paling sesuai adalah melalui sewa, sedangkan tanah reklamasi sewa lahan tanah Pelabuhan tersebut masih dalam penibahasan oleh Tim PAD Kabupaten Rembang dan Investor.

Dasar hukum yang digunakan untuk sewa lahan adalah Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

TENTANG SKPD ATAU PEJABAT SKPD YANG TIDAK MAU MENJALANKAN PERDA APBD TA 2015

Dapat kami jelaskan bahwa SKPD telah menjalankan fungsinya masing – masing sesuai Tupoksinya dengan telah diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

TENTANG PENERTIBAN CAFE- CAFE DIPINGGIR JALAN

Dapat Kami Jelaskan sebagai berikut :

Terhadap keberadaan warkop/kafe ilegal di tepi jalan, telah dilakukan langkah-langkah penertiban oleh satpol pp, tentang himbauan ketertiban buka dan tutup operasional warkop/kafe baik pada waktu bulan ramadhan maupun diluar bulan ramadhan, antara lain :

1. Di Luar Bulan Ramadhan.

- a. Untuk diluar bulan ramadhan telah dikeluarkan surat himbauan untuk melaksanakan kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan sesuai dengan perda. No. 6 Tahun 1977
- b. Pelaksanaan monitoring oleh satpol pp yang ditindak lanjuti dengan surat pernyataan bagi pemilik warkop/kafe yang terindikasi melakukan pelanggaran ketertiban / mengganggu lingkungan.

2. Bulan Ramadhan.

Untuk di bulan ramadhan telah dikeluarkan intruksi bupati rembang nomor : 556/1255/2015 ttg pengaturan kegiatan operasional usaha pariwisata pada bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri, ditindaklanjuti dengan kegiatan monitoring oleh SATPOL PP.

TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR DEFINITIF PD. PDAM REMBANG (sekaligus menjawab Fraksi Harapan)

Sedang dipersiapkan Peraturan Kepala Daerah terkait dengan Prosedur dan Tata cara pengangkatan Direktur PDAM.

4. Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Nasional Demokrat

TENTANG ADANYA IURAN LIAR DI SEKOLAH-SEKOLAH

Kami sampaikan banyak terimakasih atas masukannya, dan akan kami tindak lanjuti dengan melakukan monitoring terhadap sekolah-sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, yang disinyalir adanya iuran-iuran yang dianggap liar.

TENTANG ALAT FOGGING UNTUK MASYARAKAT

Terkait pembelian alat fogging untuk tiap desa kami akan melakukan kajian secara mendalam, mengingat saat ini cara yang paling efektif dan efisien dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Demam Berdarah adalah melalui gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Dalam gerakan PSN maka masyarakat akan kita ajak untuk membudayakan 3M (Menguras tempat penampungan air, Menutup tempat penampungan air, Mengubur barang bekas) serta penyebaran serbuk abate. Melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk tersebut maka populasi nyamuk akan dapat dikurangi secara bermakna karena nyamuk Aedes Aegypti penyebab Demam Berdarah akan kita berantas sampai dengan jentik / larva dan bahkan telur nyamuk tersebut, sedangkan apabila dilakukan fogging maka yang terbunuh hanya nyamuk dewasa serta membutuhkan biaya yang sangat besar.

TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN BPJS SECARA AUTODEBET

Terkait dengan usulan pembayaran BPJS melalui cara kolektif tingkat desa kami akan menyampaikan usulan ini kepada pihak BPJS agar segera menindaklanjuti.

TENTANG PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA MEDIS PADA IGD DAN PELAYANAN PASIEN RSUD dr. R. SOETRASNO

Untuk mengatasi meningkatnya kunjungan pasien rawat inap kami telah merambah jumlah tempat tidur sebanyak 14 tempat tidur. Untuk mengatasi meningkatnya kunjungan pasien ditetapkan kebijakan apabila kelas yang dikehendaki atau yang menjadi haknya penuh maka pasien dititipkan ke kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Dan mengenai peningkatan sarana prasarana medis IGD kami ucapkan terima kasih atas masukannya kami selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana medis khususnya di IGD.

TENTANG PUNGUTAN FASILITAS AMBULANCE TERHADAP PASIEN YANG DIRUJUK

Terkait pungutan terhadap fasilitas ambulance dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Rujukan pasien JKRS biaya ambulance yang ditanggung hanya pasien yang dirujuk ke RSUP dr. Kariadi dan RSJ Aminigondohutomo Semarang.
- b. Rujukan pasien BPJS biaya ambulance yang ditanggung adalah rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi dan dalam kondisi gawat darurat, bukan pasien rawat jalan.
- c. Pasien yang menginginkan rujuk (rujuk atas permintaan sendiri) maka biaya ambulance tidak dijamin

TENTANG PENUNDAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN JETTY TPI SARANG

Pembangunan dermaga *jetty* TPI Sarang rencana dianggarkan melalui dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 sebesar 5 Milyar, namun sesuai surat Direktorat Pelabuhan Perikanan Nomor: B.2574/DJPT.3/PL.420.D3/IV/2015 tanggal 6 April 2015 kegiatan ini ditunda.

TENTANG PENEMPATAN DAN PEMANFAAT EMBUNG BAGI MASYARAKAT

Saran kami perhatikan dan akan kami tindaklanjuti, untuk perencanaan pembangunan embung pada saat ini dan yang akan datang akan kami verifikasi lebih cermat

**5. Pemandangan Umum Fraksi Gerakan Indonesia Raya
Tentang Pencapaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah**

Terima kasih, atas apresiasi Gerakan Indonesia Raya terhadap pencapaian target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

**6. Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera
Tentang Prosentase Realisasi Pendapatan Daerah TA 2014
Sebesar 96,02% Lebih Kecil Dibanding Realisasi Pendapatan
Daerah TA 2013 Sebesar 99,9%**

Dapat Kami Jelaskan sebagai berikut :

Bahwa prosentase pendapatan daerah sebesar 96,02% merupakan total prosentase dari penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Nilai prosentase sebesar 96,02% dikarenakan penerimaan dari Dana Perimbangan hanya tercapai 98,2% dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah hanya tercapai sebesar 88,77% diantaranya penerimaan penerimaan dari hibah WISM 2 (Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2) yang berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp541.721.500,00 atau 76,38 dari anggarannya sebesar Rp709.270.000,00.

Sementara dari PAD sendiri telah memenuhi target pendapatan sebesar Rp.173.144.946.339,00 dari anggaran sebesar Rp.179.642.187.487,27 atau sebesar 103,75%

**Tentang Dikalangan Nelayan, Pemerintah Belum Bisa
Memberikan Perlindungan Atas Tekanan Dari Pemilik Modal
Dan Sangat Merugikan Nelayan”**

Pemerintah Kabupaten Rembang telah berupaya untuk memperbaiki pelayanan di TPI melalui perda no 8 tahun 2014 tentang perubahan perda No 4 tahun 2009 tentang pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang. Diharapkan melalui Perda tersebut Pembayaran hasil lelang ikan dari bakul kepada nelayan semakin baik. Disamping itu pengawasan dan pembinaan terhadap bakul peserta lelang di TPI terus dilakukan untuk menekan tunggakan kekurangan pembayaran lelang ikan (KPLI) yang dilakukan secara intensif.

**TERKAIT DENGAN BUMD PT RBSJ AGAR SEGERA MELAKUKAN RUPS
(Sekaligus menjawab Fraksi Partai Gerakan Indonesai Raya)**

Dapat Kami Jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa PT RBSJ telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015;

2. Bahwa masih kecilnya laba perusahaan tahun berjalan karena baru satu bidang usaha yaitu unit SPBU yang telah memberikan laba, sedangkan bidang usaha lainnya mengalami kemacetan dan "idle asset" , biaya amortisasi dan penyusutan besar sehingga mengurangi laba berjalan;
3. Atas dasar hal tersebut maka para Pemegang Saham telah memberikan rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Direksi dan komisaris PT RBSJ akan segera melakukan restrukturisasi bidang usaha dan rasionalisasi aset yang idle untuk mengurangi beban usaha dan meningkatkan pendapatan;
 - b. Direksi PT RBSJ diminta untuk menyampaikan laporan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang oleh PT PRK sebagai anak perusahaan bentukan PT RBSJ;
 - c. Direksi PT RBSJ harus memerintahkan PT PRK untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah oleh Auditor Independen dan segera melakukan RUPS;
 - d. Direktur Utama PT RBSJ harus menentukan salah satu pilihan sebagai Direktur Utama PT RBSJ atau PT PRK.

7. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI HARAPAN

TENTANG INVESTASI JANGKA PANJANG PADA POS INVESTASI PERMANEN, DLM LAPORAN AUDITED PT. RBSJ TERDAPAT PIUTANG MACET SEBESAR RP. 2.645.183.882,40 DAN INVESTASI TEBU RP. 9.735.647.360,00 PADA PT. SAB YG STATUSNYA DLM PROSES PENYELESAIAN OLEH PENEGAK HUKUM

Tentang Investasi Jangka Panjang pada Pos Investasi Permanen Pada Catatan Atas Laporan Keuangan PT RBSJ Audited Khususnya berkaitan dengan piutang macet dan investasi tebu dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Piutang macet proses penagihan masih terus dilakukan secara berkala, Sedangkan investasi tebu proses hukumnya atas nama Imam Sujono Sudah Selesai Proses Kasasi pada akhir tahun 2014 Dengan putusan menolak pengajuan kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan sebelumnya Yang memutuskan Imam Sujono untuk membayar kerugian negara Sebesar Rp.4.276.443.855,- Dan pidana penjara selama 7 tahun. Sedangkan kekurangannya akan dilakukan upaya perdata kepada Imam Sujono atas kekurangan pembayaran dari Imam Sujono.

TENTANG DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), MOHON PENJELASAN REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS YANG HANYA MENCAPAI 75%

Dapat Kami Jelaskan sebagai berikut :

Pagu anggaran DAK tahun 2014 adalah sebesar rp. 61.608.000.000,- transfer dari pusat yang masuk ke kas daerah adalah sebesar Rp. 46.206.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 40.058.651.912, sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 6.147.348.088,-.

Adanya sisa sebesar itu dikarenakan ada skpd penerima dak (rsu dan dinlutkan) tidak bisa melaksanakan anggaran dak sehingga uang transfer dari pusat tidak bisa ditransfer adapun syarat untuk penyaluran dak adalah pertanggungjawaban sebesar 90% laporan dak yang realisasinya kurang dari 90 % dana dak untuk tahap selanjutnya tidak bisa dikirim ke rekening kas umum daerah.

TENTANG BELANJA PEGAWAI, PADA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS REALISASINYA HANYA 63,75% , UPAH PUNGUT PAJAK DAERAH SEBESAR RP. 67,4,% , UPAH PUNGUT RETRIBUSI DAERAH SEBESAR RP. 48,86% SEMENTARA PENCAPAIANPENDAPATAN PAJAK DAERAH MELEBIHI TARGET YAKNI MENCAPAI 117,75% DAN PENDAPATAN RETRIBUSI MENCAPAI 106,91% , APAKAH INI KEKELIRUAN DALAM PENGANGGARAN ATAU UNSUR KESENGAJAAN.

Dapat Kami Jelaskan sebagai berikut :

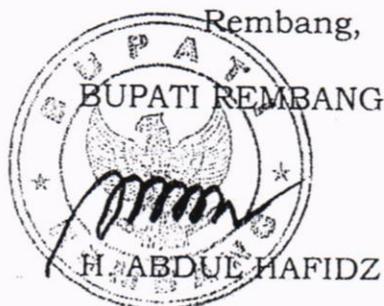
Bahwa realisasi belanja pegawai pada tambahan penghasilan PNS dengan pencapaian 63,75 % , tidak terdapat selisih antara rencana dengan realisasi sebesar Rp.131.889.695,00 karena nilai sebesar Rp.131.889.695,00 tersebut merupakan realiasi belanja pegawai pada tambahan penghasilan PNS tahun anggaran 2013.

Rapat Dewan dan Hadirin yang saya hormati,

Demikian yang dapat Kami jelaskan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis saya mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan Komisi-komisi.

Akhirnya tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 30 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Hari : KAMIS
Tanggal : 25 Juni 2015
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT:
 1. Pembukaan;
 2. Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
 3. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
 4. Persetujuan Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
 5. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
 6. Penutup.

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 14 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat	Bupati Rembang
Yang saya hormati	Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua undangan lainnya.

Mengawali rapat paripurna ini, perkenankan saya mengajak semua hadirin yang ada di sini untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengemban tugas melaksanakan Rapat Paripurna Ketiga (III) DPRD Kabupaten Rembang membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 dalam keadaan sehat walafiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Mei 2015, dilalui dengan berbagai tahapan, baik yang bersifat internal yakni oleh DPRD sendiri, maupun yang bersifat eksternal yakni antara DPRD dengan eksekutif. Adapun rapat paripurna ketiga ini adalah merupakan rapat terakhir dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Ketentuan kuorum yang berlaku dalam Rapat Paripurna Ketiga (III) hari ini, adalah sama dengan ketentuan kuorum yang berlaku dalam Rapat- rapat Paripurna sebelumnya, baik Rapat Paripurna Pertama (I) maupun Rapat Paripurna Kedua (II) membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 yakni dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Hal ini tertuang dalam pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir

secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 30 orang. Dengan demikian ketentuan kuorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara yang akan berlangsung dalam Rapat Paripurna hari ini, yaitu :

1. Pembukaan.
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014;
3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 ;
5. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.
6. Penutup.

Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Kepada Sekretaris Badan Anggaran Sdr. Drs. Achmad Mualif dipersilahkan.

===== *LAPORAN BADAN ANGGARAN* =====

➤ (*Laporan Badan Anggaran terlampir*)

Terima kasih Sdr. Drs. Achmad Mualif atas penyampaian laporannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014. Kepada Saudara-saudara anggota yang akan mewakili fraksinya untuk menyampaikan pendapat fraksi saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Zaimul Umam NS
2. Fraksi Demokrat : Edi Kartono, S.Pd. MH
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Muh. Bahaud Duror, SPI
5. Fraksi Partai Gerindra : Puji Santoso, SP. MH
6. Fraksi Karya Sejahtera : Catur Winanto, SH
7. Fraksi Harapan : Sukarmain

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan saya persilahkan untuk menyampaikan pendapat akhirnya.

Dipersilahkan.

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	✓		
Fraksi Partai Gerindra	✓		
Fraksi Karya Sejahtera	✓		
Fraksi Harapan	✓		

Terima kasih kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya dalam Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah mendengar Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Fraksi, maka sudah dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 dapat diterima dan disetujui, namun untuk keabsahannya perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota DPRD. Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-Saudara Anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 dan Rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran DPRD melalui Laporrannya dapat disetujui ?”

=====SETUJU=====

*(Dengan bulat semua anggota DPRD menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)*

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara kelima yaitu Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Kepada saudara Bupati Rembang dipersilahkan

=====PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI =====

➤ (Pendapat Akhir Bupati terlampir)

Terima kasih saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita lalui dengan seksama, akhirnya terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Bupati Rembang beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD baik yang masuk dalam Komisi-Komisi maupun Badan Anggaran serta Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga dapat menyelesaikan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Kepada saudara-saudara yang telah mengikuti Rapat , kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, kehadiran serta kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya dengan mengucap “ *Alhamdulillah* *robbil ‘alamin* “ tepat pukul 13.25 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

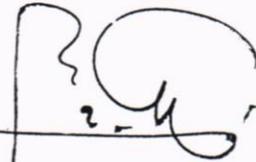
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS



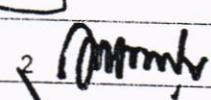
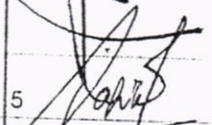
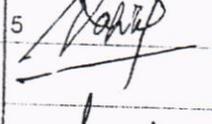
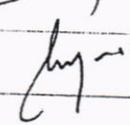
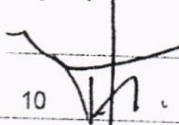
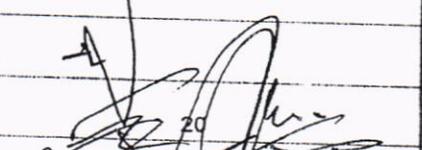
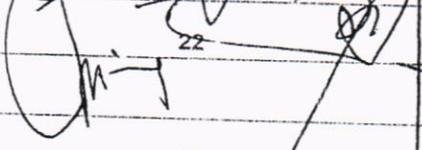
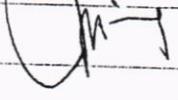
Drs. ACHMAD MUALIF

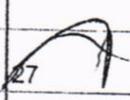
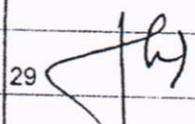
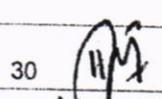
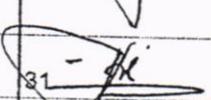
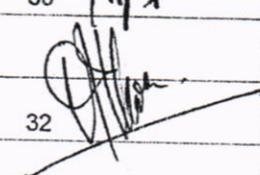
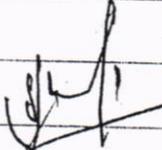
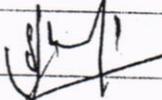
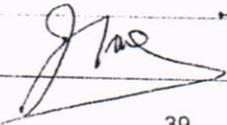
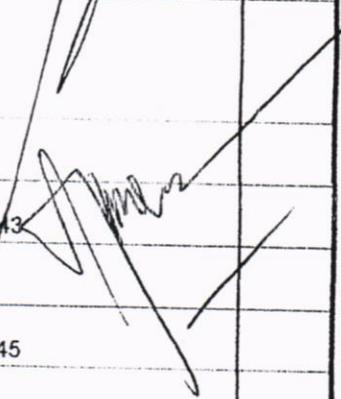
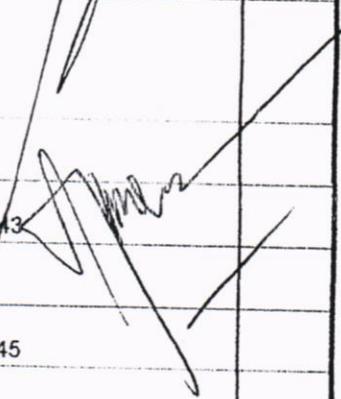
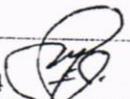
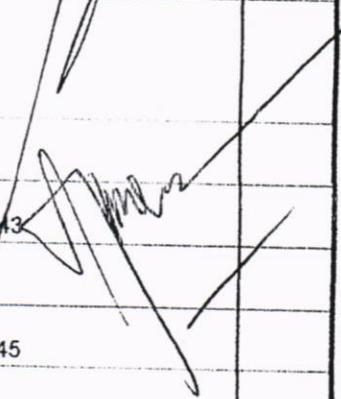
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2014**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2014;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2014;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Nomor Tahun 2015
Tentang Persetujuan Penetapan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
- LAMPIRAN V : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2014.

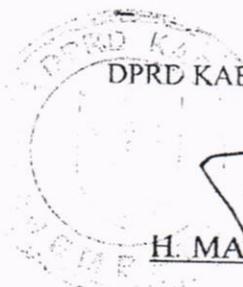
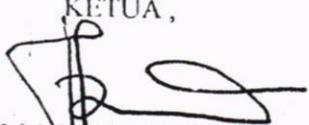
KAPAL PARIPOKNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. REMBANG TH. 2014
HARI/TANGGAL : KAMIS, 25 JUNI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENUKI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, SE	Anggota		
18	MUGIYARTO, ST	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, BA	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota		

FRAKSI I'DI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26 
27	WIDODO	Anggota	27 
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28 
29	SUMARSIH	Anggota	29 
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32 
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33 
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
35	PUJI SANTOSO, SP. MH	Anggota	35 
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36 
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39 
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40 
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41 
FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42 
43	SUKARMAIN	Anggota	43 
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44 
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45 

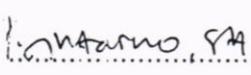
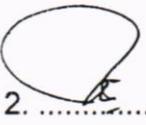
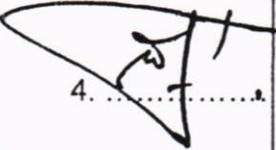
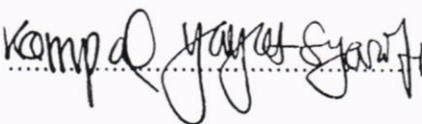
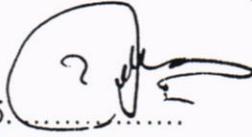
Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

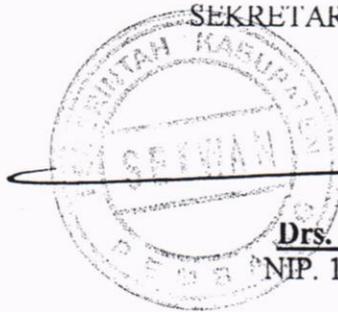

 DPRD KABUPATEN REMBANG
 KETUA,

 H. MAJID KAMIL MZ

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014

HARI/TANGGAL : KAMIS , 25 JUNI 2015
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2		Kejaksaan Negeri Rembang	2. 
3	Pengadilan Negeri Rembang	3.
4		Dandim 0720 Rembang	4. 
5		Kepolisian Resort Rembang	5. 
6	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6.
7	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



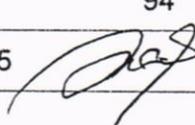

Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014

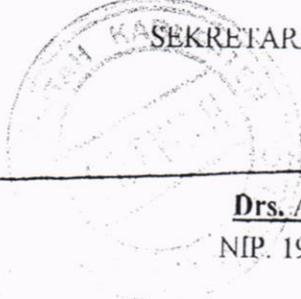
HARI/TANGGAL : KAMIS , 25 JUNI 2015
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SAB	1 W
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Aleksander	Katig	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End Sulaiman	ORPEB	15
16	BAG. UMUM	Ismanie		16
17	DPPKAD	Ibd. Chalig	Sibby Perencana	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA	Ey Hudooyo		19
20	BPMPKIB	Priyati	kebid. KB	20
21	B K D	Bambang R	kebid	21
22	BKP & P4K			22
23	B P B D			23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN	Mursih S.	Kesubbng UP.	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT	Cipto. K		28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sekretaris	29

NO	EADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO			30
31	DINAS DUKCAPIL	MUGILWID	Dukcapil	31
32	DINSO:3NAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM			34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rustiyanto		35
36	KANTOR KESEANGPOLINMAS	Zubaidi	Kori	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR PPT	STI Sugiyanti	KPPT	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Y. Eko Sulaksana	Kabep TV	39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	MASRI SOEKAMTO	PKK. KAB. RBC	41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG	API L		45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH	Setyorini, B	Ka. Unit	49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	MASUDI	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95	KOMPAS	Handoko	Ketua cab	95 

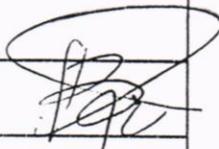
NO	BADAN/BAGI/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105

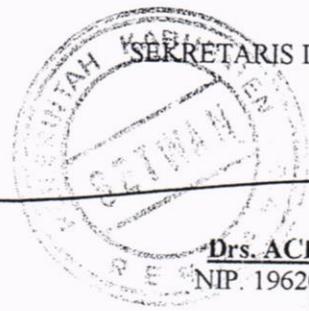

 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

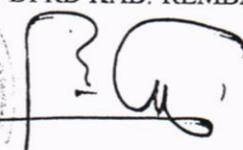
**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TH 2014**

HARI/TANGGAL : KAMIS , 25 JUNI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	Chris Pradyana	2 
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	Subagyo	12 
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	14



 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. ACHMAD MUALIF

 NIP. 19620804 198803 1 011

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN REMBANG**

MEMBAHAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014.



TANGGAL 25 JUNI 2015



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2014**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 04 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
10. Surat Bupati Rembang Nomor 900/09740/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Pengiriman Raperda;
11. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 27 Mei 2015 yang mengagendakan Jadwal Rapat-rapat DPRD dalam membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2015 Jam 12.00 WIB dengan agenda penjelasan lanjutan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.
- b. Rapat-rapat Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Rembang dengan SKPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
Hari : Senin s/d Selasa

Tanggal : 22 s/d 23 Juni 2015
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD
Kabupaten Rembang
Acara : Pendalaman Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2014

c. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Juni 2015
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Rembang
Acara : Penyampaian Laporan Komisi Atas
Pendalaman Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2014

d. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Juni 2015
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Rembang
Acara : Konsultasi dan Sinkronisasi hasil
pembahasan Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2014.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. RINGKASAN PERTAKUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2014

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PEMBAHASAN		
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN DAERAH	1.384.690.314.469,00	1.329.587.756.593,27	(55.102.557.875,73)	96,02	1.329.587.756.593,27	(55.102.557.875,73)	96,02
1.1	Pendapatan Asli Daerah	173.144.946.339,00	179.642.187.487,27	6.497.241.148,27	103,75	179.642.187.487,27	6.497.241.148,27	103,75
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.816.917.900,00	38.643.241.316,00	5.826.324.316,00	117,75	38.643.241.316,00	5.826.324.316,00	117,75
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	38.845.073.000,00	41.529.546.666,00	2.684.473.666,00	106,91	41.529.546.666,00	2.684.473.666,00	106,91
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	6.222.204.000,00	6.183.205.661,00	(38.998.339,00)	99,37	6.183.205.661,00	(38.998.339,00)	99,37
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.260.752.339,00	93.285.193.844,27	(1.974.558.494,73)	97,93	93.285.193.844,27	(1.974.558.494,73)	97,93
1.2	Dana Perimbangan	790.115.861.651,00	775.863.183.184,00	(14.252.678.467,00)	98,20	775.863.183.184,00	(14.252.678.467,00)	98,20
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.733.140.651,00	28.882.462.184,00	1.149.321.533,00	104,14	28.882.462.184,00	1.149.321.533,00	104,14
1.2.2	Dana Alokasi Umum	700.774.721.000,00	700.774.721.000,00	-	100,00	700.774.721.000,00	-	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.608.000.000,00	46.206.000.000,00	(15.402.000.000,00)	75,00	46.206.000.000,00	(15.402.000.000,00)	75,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	421.429.506.479,00	374.062.385.922,00	(47.347.120.557,00)	88,77	374.062.385.922,00	(47.347.120.557,00)	88,77
1.3.1	Hibah	709.270.000,00	541.721.500,00	(167.548.500,00)	76,38	541.721.500,00	(167.548.500,00)	76,38
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	52.172.513.479,00	72.995.869.203,00	20.823.355.724,00	139,91	72.995.869.203,00	20.823.355.724,00	139,91
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	232.816.985.000,00	172.399.233.000,00	(60.417.752.000,00)	74,05	172.399.233.000,00	(60.417.752.000,00)	74,05
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	135.730.738.000,00	128.145.562.219,00	(7.585.175.781,00)	94,41	128.145.562.219,00	(7.585.175.781,00)	94,41
2	BELANJA DAERAH	1.540.612.631.176,00	1.275.908.646.560,06	(264.703.984.615,94)	82,82	1.275.908.646.560,06	(264.703.984.615,94)	82,82
2.1	Belanja Tidak Langsung	861.193.625.650,00	710.279.611.649,00	(150.914.014.001,00)	82,48	710.279.611.649,00	(150.914.014.001,00)	82,48
2.1.1	Belanja Pegawai	771.430.254.850,00	632.725.569.032,00	(138.704.685.818,00)	82,02	632.725.569.032,00	(138.704.685.818,00)	82,02
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000,00	14.340.417,00	(22.659.583,00)	38,76	14.340.417,00	(22.659.583,00)	38,76
2.1.4	Belanja Hibah	45.093.345.800,00	39.727.269.200,00	(5.366.076.600,00)	88,10	39.727.269.200,00	(5.366.076.600,00)	88,10
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.313.525.000,00	2.552.273.000,00	(1.761.252.000,00)	59,17	2.552.273.000,00	(1.761.252.000,00)	59,17
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	39.319.500.000,00	35.163.035.000,00	(4.156.465.000,00)	89,43	35.163.035.000,00	(4.156.465.000,00)	89,43
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	97.125.000,00	(902.875.000,00)	9,71	97.125.000,00	(902.875.000,00)	9,71
2.2	Belanja Langsung	679.419.005.526,00	565.629.034.911,06	(113.789.970.614,94)	83,25	565.629.034.911,06	(113.789.970.614,94)	83,25
2.2.1	Belanja Pegawai	94.399.646.200,00	86.882.064.130,00	(7.517.582.040,00)	92,04	86.882.064.130,00	(7.517.582.040,00)	92,04
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	363.818.366.438,00	327.292.056.989,06	(36.526.309.448,94)	89,96	327.292.056.989,06	(36.526.309.448,94)	89,96
2.2.3	Belanja Modal	221.200.992.888,00	151.454.913.762,00	(69.746.079.126,00)	68,47	151.454.913.762,00	(69.746.079.126,00)	68,47
	Jumlah Belanja surplus (devisit)	1.540.612.631.176,00 (155.922.316.707,00)	1.275.908.646.560,06 53.679.110.033,21	(264.703.984.615,94) 209.601.426.740,21	82,82 (34,43)	1.275.908.646.560,06 53.679.110.033,21	(264.703.984.615,94) 209.601.426.740,21	82,82 (34,43)
3	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	167.086.316.707,00	167.066.868.874,34	(19.447.832,66)	99,99	167.066.868.874,34	(19.447.832,66)	99,99
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	167.086.316.707,00	167.066.868.874,34	(19.447.832,66)	99,99	167.066.868.874,34	(19.447.832,66)	99,99
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	167.086.316.707,00	167.066.868.874,34	(19.447.832,66)	99,99	167.066.868.874,34	(19.447.832,66)	99,99
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.164.000.000,00	11.162.450.842,00	(1.549.158,00)	99,99	11.162.450.842,00	(1.549.158,00)	99,99
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.109.000.000,00	11.109.000.000,00	-	-	11.109.000.000,00	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	55.000.000,00	53.450.842,00	(1.549.158,00)	97,18	53.450.842,00	(1.549.158,00)	97,18
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.164.000.000,00	11.162.450.842,00	(1.549.158,00)	99,99	11.162.450.842,00	(1.549.158,00)	99,99
	Pembiayaan Netto	155.922.316.707,00	155.904.418.032,34	(17.898.674,66)	99,99	155.904.418.032,34	(17.898.674,66)	99,99
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	209.583.528.065,55	209.583.528.065,55		209.583.528.065,55	209.583.528.065,55	

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	DINAS PENDIDIKAN		576.423.381.350,00	79.198.902.700,00	655.622.284.050,00
2	DINAS KESEHATAN	28.906.974.000,00	36.042.586.000,00	50.774.458.566,00	86.817.044.566,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	70.000.000.000,00	21.917.501.000,00	75.507.544.000,00	97.425.045.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	3.694.959.000,00	12.531.235.000,00	257.659.687.384,00	270.190.922.384,00
5	BAPPEDA		2.812.488.000,00	7.434.000.000,00	10.246.488.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.542.972.000,00	4.710.224.000,00	7.546.156.200,00	12.256.380.200,00
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP		2.037.964.000,00	3.485.113.000,00	5.523.077.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	82.325.000,00	2.296.640.000,00	2.624.819.000,00	4.921.499.000,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		7.903.209.000,00	6.354.422.710,00	14.257.631.710,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI		4.545.865.000,00	2.246.892.000,00	6.792.757.000,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	3.784.052.000,00	7.591.519.000,00	7.916.251.649,00	15.507.770.649,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.207.681.000,00	3.422.698.000,00	4.630.379.000,00
13	SATPOL PP		2.966.129.000,00	1.508.761.600,00	4.474.890.600,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.722.006.000,00	6.853.100.000,00	8.575.106.000,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		8.403.812.000,00	-	8.403.812.000,00
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		579.946.000,00	-	579.946.000,00
17	SETDA	1.924.446.000,00	11.335.938.000,00	27.091.545.000,00	38.427.483.000,00
18	SEKRETARIAT DPRD		3.046.733.000,00	14.393.738.000,00	17.440.471.000,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.260.091.575.469,00	99.602.177.800,00	14.408.202.000,00	114.010.379.800,00
a	(SKPD)	48.546.207.339,00	9.838.807.000,00	14.408.202.000,00	24.247.009.000,00
b	(PPKD)	1.211.545.368.130,00	89.763.370.800,00	-	89.763.370.800,00
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.067.225.000,00	3.999.696.000,00	7.066.921.000,00
21	BKD		2.953.226.000,00	3.471.517.000,00	6.424.743.000,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.107.567.000,00	1.131.129.000,00	2.238.696.000,00
23	KECAMATAN REMBANG		4.337.283.000,00	412.391.000,00	4.749.674.000,00
24	KECAMATAN KALIORI		1.747.709.000,00	675.860.000,00	2.423.569.000,00
25	KECAMATAN SULANG		1.463.244.000,00	483.350.000,00	1.946.594.000,00
26	KECAMATAN SUMBER		1.473.037.000,00	460.380.000,00	1.933.417.000,00
27	KECAMATAN BULU		1.335.873.000,00	413.972.000,00	1.749.845.000,00
28	KECAMATAN LASEM		1.636.987.000,00	719.267.000,00	2.356.254.000,00
29	KECAMATAN PANÇUR		1.831.859.000,00	369.200.000,00	2.201.059.000,00
30	KECAMATAN SLUKE		1.321.157.000,00	641.914.000,00	1.963.071.000,00
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.349.019.000,00	282.744.000,00	1.631.763.000,00
32	KECAMATAN GUNEM		1.334.831.000,00	532.434.000,00	1.867.265.000,00
33	KECAMATAN SALE		1.271.548.000,00	658.849.000,00	1.930.397.000,00
34	KECAMATAN KPAGAN		1.692.590.000,00	698.405.000,00	2.390.995.000,00
35	KECAMATAN SEDAN		1.448.042.000,00	244.258.000,00	1.692.300.000,00
36	KECAMATAN SAFANG		1.475.938.000,00	445.832.000,00	1.921.770.000,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.635.602.000,00	1.338.377.000,00	2.973.979.000,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133.472.000,00	5.588.524.500,00	45.208.877.072,00	50.797.401.572,00
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.435.965.000,00	1.679.496.000,00	9.115.461.000,00
40	DINAS ESDM		2.198.151.000,00	12.384.894.000,00	14.583.045.000,00
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN CLAH RAGA	1.046.000.000,00	2.232.887.000,00	6.439.450.000,00	8.672.337.000,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.483.539.000,00	3.578.326.000,00	28.300.381.645,00	31.878.707.645,00
	JUMLAH	1.384.690.314.469,00	861.193.625.650,00	679.419.005.526,00	1.540.612.631.176,00

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		REALISASI			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	DINAS PENDIDIKAN		448.756.831.114,00	48.040.765.371,00	496.797.596.485,00
2	DINAS KESEHATAN	29.184.517.270,00	33.576.518.586,00	45.263.141.635,00	78.839.660.221,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	57.662.346.426,27	20.933.619.178,00	58.074.933.898,06	79.008.553.076,06
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	3.457.666.550,00	11.954.398.521,00	236.430.210.986,00	248.384.609.507,00
5	BAPPEDA		2.701.496.197,00	7.204.239.710,00	9.905.735.907,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.844.184.311,00	4.502.538.179,00	5.392.346.406,00	9.894.884.585,00
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP		1.965.769.331,00	3.265.407.024,00	5.231.176.355,00
8	DINAS KEPERDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	82.325.000,00	2.204.219.585,00	2.345.739.346,00	4.549.958.931,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		7.511.315.470,00	6.203.876.849,00	13.715.192.319,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4.323.517.262,00	2.163.319.399,00	6.486.836.661,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.127.857.815,00	7.226.504.087,00	7.257.373.299,00	14.483.877.386,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.152.307.167,00	3.253.398.631,00	4.405.705.798,00
13	SATPOL PP		2.823.678.116,00	1.464.504.850,00	4.288.182.966,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.633.736.577,00	6.612.360.300,00	8.246.096.877,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		8.214.490.814,00	-	8.214.490.814,00
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		407.358.619,00	-	407.358.619,00
17	SETDA	1.910.015.242,00	10.732.403.558,00	24.899.628.892,00	35.632.032.450,00
18	SEKRETARIAT DPRD		2.914.247.943,00	11.406.347.597,00	14.320.595.540,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.214.659.525.024,00	85.814.093.668,00	11.249.293.775,00	97.063.387.443,00
a	(SKPD)	64.713.955.918,00	8.260.051.051,00	11.249.293.775,00	19.509.344.826,00
b	(PPKD)	1.149.945.569.106,00	77.554.042.617,00	-	77.554.042.617,00
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		2.873.449.514,00	3.780.937.085,00	6.654.386.599,00
21	BKD		2.814.840.066,00	3.071.770.780,00	5.886.610.846,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.060.478.972,00	1.046.488.179,00	2.106.967.151,00
23	KECAMATAN REMBANG		4.137.628.803,00	407.964.350,00	4.545.593.153,00
24	KECAMATAN KALIORI		1.663.923.628,00	465.759.000,00	2.129.682.628,00
25	KECAMATAN SULANG		1.382.859.985,00	469.931.190,00	1.852.791.175,00
26	KECAMATAN SUMBER		1.405.350.932,00	455.506.495,00	1.860.857.427,00
27	KECAMATAN BULU		1.260.520.821,00	410.923.437,00	1.671.444.258,00
28	KECAMATAN LASEM		1.558.456.251,00	416.172.838,00	1.974.629.089,00
29	KECAMATAN PANCUR		1.749.828.992,00	356.789.556,00	2.106.618.548,00
30	KECAMATAN SLIJE		1.251.042.721,00	636.992.307,00	1.888.035.028,00
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.283.674.224,00	274.271.000,00	1.557.945.224,00
32	KECAMATAN GUNEM		1.270.835.476,00	527.757.200,00	1.798.592.676,00
33	KECAMATAN SALE		1.211.011.846,00	651.893.000,00	1.862.904.846,00
34	KECAMATAN KRAGAN		1.613.526.443,00	657.900.450,00	2.271.426.893,00
35	KECAMATAN SEDAN		1.385.279.869,00	238.606.600,00	1.623.886.469,00
36	KECAMATAN SARANG		1.437.610.469,00	443.261.118,00	1.880.871.587,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.564.560.727,00	1.278.283.055,00	2.842.843.782,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	134.877.000,00	5.351.799.964,00	44.097.670.016,00	49.449.469.980,00
39	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.064.671.829,00	1.664.053.480,00	8.728.725.309,00
40	DINAS ESDM		2.043.602.879,00	8.375.413.930,00	10.419.016.809,00
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.065.969.060,00	2.126.618.034,00	5.412.262.634,00	7.538.880.668,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.458.472.895,00	3.418.995.232,00	9.961.539.243,00	13.380.534.475,00
	JUMLAH	1.329.587.756.593,27	710.279.611.649,00	565.629.034.911,06	1.275.908.646.560,06

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	-	(127.666.550.236,00)	(31.158.137.329,00)	(158.824.687.565,00)
2	DINAS KESEHATAN	277.543.270,00	(2.466.067.414,00)	(5.511.316.931,00)	(7.977.384.345,00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(12.337.653.573,73)	(983.881.822,00)	(17.432.610.101,94)	(18.416.491.923,94)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	(237.292.450,00)	(576.836.479,00)	(21.229.476.398,00)	(21.806.312.877,00)
5	BAPPENDA	-	(110.991.803,00)	(229.760.290,00)	(340.752.093,00)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	301.212.311,00	(207.685.821,00)	(2.153.609.794,00)	(2.361.495.615,00)
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	-	(72.194.669,00)	(219.705.916,00)	(291.900.645,00)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(92.420.415,00)	(279.119.654,00)	(371.540.069,00)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(391.893.530,00)	(150.545.861,00)	(542.439.391,00)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	(222.347.738,00)	(83.572.601,00)	(305.920.339,00)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	343.805.815,00	(365.014.913,00)	(658.878.350,00)	(1.023.893.263,00)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(55.373.833,00)	(169.299.369,00)	(224.673.202,00)
13	SATPOL PP	-	(142.450.884,00)	(44.256.750,00)	(186.707.634,00)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(88.269.423,00)	(240.739.700,00)	(329.009.123,00)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(189.321.186,00)	-	(189.321.186,00)
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(172.587.381,00)	-	(172.587.381,00)
17	SETDA	(14.430.758,00)	(603.534.442,00)	(2.191.916.108,00)	(2.795.450.550,00)
18	SEKRETARIAT DPRD	-	(132.485.057,00)	(2.987.390.403,00)	(3.119.875.460,00)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	(45.432.050.445,00)	(13.788.084.132,00)	(3.156.908.225,00)	(16.946.992.357,00)
a	(SKPD)	16.167.748.579,00	(1.578.755.949,00)	(3.158.908.225,00)	(4.737.664.174,00)
b	(PPKD)	(61.599.799.024,00)	(12.209.328.183,00)	-	(12.209.328.183,00)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(193.775.486,00)	(218.758.915,00)	(412.534.401,00)
21	BKD	-	(138.385.934,00)	(399.746.220,00)	(538.132.154,00)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	(47.088.028,00)	(84.640.821,00)	(131.728.849,00)
23	KECAMATAN REMBANG	-	(199.654.197,00)	(4.426.650,00)	(204.080.847,00)
24	KECAMATAN KALIORI	-	(93.785.372,00)	(210.101.000,00)	(293.886.372,00)
25	KECAMATAN SUILANG	-	(80.384.015,00)	(13.418.810,00)	(93.802.825,00)
26	KECAMATAN SUMBER	-	(67.686.068,00)	(4.873.505,00)	(72.559.573,00)
27	KECAMATAN BULU	-	(75.352.179,00)	(3.048.563,00)	(78.400.742,00)
28	KECAMATAN LASEM	-	(78.530.749,00)	(303.094.162,00)	(381.624.911,00)
29	KECAMATAN PANCUR	-	(82.030.008,00)	(12.410.444,00)	(94.440.452,00)
30	KECAMATAN SLUKE	-	(70.114.279,00)	(4.921.693,00)	(75.035.972,00)
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	(65.344.776,00)	(3.473.000,00)	(73.817.776,00)
32	KECAMATAN GUNEM	-	(63.995.524,00)	(4.676.800,00)	(68.672.324,00)
33	KECAMATAN SALE	-	(60.536.154,00)	(6.956.000,00)	(67.492.154,00)
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(79.063.557,00)	(40.504.550,00)	(119.568.107,00)
35	KECAMATAN SEDAN	-	(62.762.131,00)	(5.651.400,00)	(68.413.531,00)
36	KECAMATAN SARANG	-	(38.327.531,00)	(2.570.882,00)	(40.898.413,00)
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	(71.041.273,00)	(60.093.945,00)	(131.135.218,00)
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1.405.000,00	(236.724.536,00)	(1.111.207.056,00)	(1.347.931.592,00)
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	(371.293.171,00)	(15.442.520,00)	(386.735.691,00)
40	DINAS ESDM	-	(154.548.121,00)	(4.009.480.070,00)	(4.164.028.191,00)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	19.969.060,00	(106.268.966,00)	(1.027.187.366,00)	(1.133.456.332,00)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.974.933.893,00	(159.330.768,00)	(18.338.842.402,00)	(18.498.173.170,00)
	JUMLAH	(55.102.557.875,73)	(150.914.014.001,00)	(113.789.970.614,94)	(264.703.984.615,94)

NO.	SKPD	MENJADI			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN		448.756.831.114,00	48.040.765.371,00	496.797.596.485,00
2	DINAS KESEHATAN	29.184.517.270,00	33.576.518.586,00	45.263.141.635,00	78.839.660.221,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	57.662.346.426,27	20.933.619.178,00	58.074.933.898,06	79.008.553.076,06
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	3.457.666.550,00	11.954.398.521,00	236.430.210.986,00	248.384.609.507,00
5	BAPPEDA		2.701.496.197,00	7.204.239.710,00	9.905.735.907,00
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.844.184.311,00	4.502.538.179,00	5.392.346.406,00	9.894.884.585,00
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP		1.965.769.331,00	3.265.407.024,00	5.231.176.355,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	82.325.000,00	2.204.219.585,00	2.345.739.346,00	4.549.958.931,00
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		7.511.315.470,00	6.203.876.849,00	13.715.192.319,00
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4.323.517.262,00	2.163.319.399,00	6.486.836.661,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOOPERASI DAN UKM	4.127.857.815,00	7.226.504.087,00	7.257.373.299,00	14.483.877.386,00
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.152.307.167,00	3.253.398.631,00	4.405.705.798,00
13	SATPOL PP		2.823.678.116,00	1.464.504.850,00	4.288.182.966,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.633.736.577,00	6.612.360.300,00	8.246.096.877,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		8.214.490.814,00	-	8.214.490.814,00
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		407.358.619,00	-	407.358.619,00
17	SETDA	1.910.015.242,00	10.732.403.558,00	24.899.628.892,00	35.632.032.450,00
18	SEKRETARIAT DPRD		2.914.247.943,00	11.406.347.597,00	14.320.595.540,00
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.214.659.525.024,00	85.814.093.668,00	11.249.293.775,00	97.063.387.443,00
a	(SKPD)	64.713.955.918,00	8.260.051.051,00	11.249.293.775,00	19.509.344.826,00
b	(PPKI)	1.149.945.569.106,00	77.554.042.617,00	-	77.554.042.617,00
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		2.873.449.514,00	3.780.937.085,00	6.654.386.599,00
21	BKD		2.814.840.063,00	3.071.770.780,00	5.886.610.846,00
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.060.478.972,00	1.046.488.179,00	2.106.967.151,00
23	KECAMATAN REMBANG		4.137.628.803,00	407.964.350,00	4.545.593.153,00
24	KECAMATAN KAI LORI		1.663.923.628,00	465.759.000,00	2.129.682.628,00
25	KECAMATAN SUJANG		1.382.859.985,00	469.931.190,00	1.852.791.175,00
26	KECAMATAN SUMBER		1.405.350.932,00	455.506.495,00	1.860.857.427,00
27	KECAMATAN BULU		1.260.520.821,00	410.923.437,00	1.671.444.258,00
28	KECAMATAN LASEM		1.558.456.251,00	416.172.838,00	1.974.629.089,00
29	KECAMATAN PANCUR		1.749.828.992,00	356.789.556,00	2.106.618.548,00
30	KECAMATAN SLUKE		1.251.042.721,00	636.992.307,00	1.888.035.028,00
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.283.674.224,00	274.271.000,00	1.557.945.224,00
32	KECAMATAN GUNEM		1.270.835.476,00	527.757.200,00	1.798.592.676,00
33	KECAMATAN SILE		1.211.011.846,00	651.893.000,00	1.862.904.846,00
34	KECAMATAN KRAGAN		1.613.526.443,00	657.900.450,00	2.271.426.893,00
35	KECAMATAN SEDAN		1.385.279.869,00	238.606.600,00	1.623.886.469,00
36	KECAMATAN SAFANG		1.437.610.469,00	443.261.118,00	1.880.871.587,00
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.564.560.727,00	1.278.283.055,00	2.842.843.782,00
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	134.877.000,00	5.351.799.964,00	44.097.670.016,00	49.449.469.980,00
39	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAYANAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.064.671.829,00	1.664.053.480,00	8.728.725.309,00
40	DINAS ESDM		2.043.602.879,00	8.375.413.930,00	10.419.016.809,00
41	DINAS KEBUCAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.065.969.060,00	2.126.618.034,00	5.412.262.634,00	7.538.880.668,00
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.458.472.895,00	3.418.995.232,00	9.961.539.243,00	13.380.534.475,00
	JUMLAH	1.329.587.756.593,27	710.279.611.649,00	565.629.034.911,06	1.275.908.646.560,06

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	HASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		JUMLAH		
1	DINAS PENDIDIKAN	-	(127.666.550.236,00)	(31.158.137.329,00)	(158.824.687.565,00)
2	DINAS KESEHATAN	277.543.270,00	(2.466.067.414,00)	(5.511.316.931,00)	(7.977.384.345,00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(12.337.653.573,73)	(983.881.822,00)	(17.432.610.101,94)	(18.416.491.923,94)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	(237.292.450,00)	(576.836.479,00)	(21.229.476.398,00)	(21.806.312.877,00)
5	BAPPEDA	-	(110.991.803,00)	(229.760.290,00)	(340.752.093,00)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	301.212.311,00	(207.685.821,00)	(2.152.809.794,00)	(2.361.495.615,00)
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	-	(72.194.669,00)	(219.705.976,00)	(291.900.645,00)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(92.420.415,00)	(279.119.654,00)	(371.540.069,00)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERCEMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(391.893.530,00)	(150.545.861,00)	(542.439.391,00)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	(222.347.738,00)	(83.572.601,00)	(305.920.339,00)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	345.805.815,00	(365.014.913,00)	(658.878.350,00)	(1.023.893.263,00)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(55.373.833,00)	(169.299.369,00)	(224.673.202,00)
13	SATPOL PP	-	(142.450.884,00)	(44.256.750,00)	(186.707.634,00)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(88.269.423,00)	(240.739.700,00)	(329.009.123,00)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(189.321.186,00)	-	(189.321.186,00)
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(172.587.381,00)	-	(172.587.381,00)
17	SETDA	(14.430.758,00)	(603.534.442,00)	(2.191.916.108,00)	(2.795.450.550,00)
18	SEKRETARIAT DPRD	-	(132.485.057,00)	(2.987.390.403,00)	(3.119.875.460,00)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(45.432.050.445,00)	(13.788.084.132,00)	(3.158.908.225,00)	(16.946.992.357,00)
a	(SKPD)	16.167.748.579,00	(1.578.755.949,00)	(3.158.908.225,00)	(4.737.664.174,00)
b	(PPKD)	(61.519.799.024,00)	(12.209.328.183,00)	-	(12.209.328.183,00)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(193.775.486,00)	(218.758.915,00)	(412.534.401,00)
21	BKD	-	(138.385.934,00)	(399.746.220,00)	(538.132.154,00)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	(47.089.028,00)	(84.640.821,00)	(131.728.849,00)
23	KECAMATAN REMBANG	-	(199.654.197,00)	(4.426.650,00)	(204.080.847,00)
24	KECAMATAN KALIORI	-	(83.785.372,00)	(210.101.000,00)	(293.886.372,00)
25	KECAMATAN SULANG	-	(80.384.015,00)	(13.418.810,00)	(93.802.825,00)
26	KECAMATAN SUMBER	-	(67.686.068,00)	(4.873.505,00)	(72.559.573,00)
27	KECAMATAN BULU	-	(75.352.179,00)	(3.048.563,00)	(78.400.742,00)
28	KECAMATAN LASIEM	-	(78.530.749,00)	(303.094.162,00)	(381.624.911,00)
29	KECAMATAN PANCUR	-	(82.030.008,00)	(12.410.444,00)	(94.440.452,00)
30	KECAMATAN SLUKE	-	(70.114.279,00)	(4.921.693,00)	(75.035.972,00)
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	(65.344.776,00)	(8.473.000,00)	(73.817.776,00)
32	KECAMATAN GUNEM	-	(63.995.524,00)	(4.676.800,00)	(68.672.324,00)
33	KECAMATAN SALE	-	(60.536.154,00)	(6.956.000,00)	(67.492.154,00)
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(79.063.557,00)	(40.504.550,00)	(119.568.107,00)
35	KECAMATAN SELUAN	-	(62.762.131,00)	(5.651.400,00)	(68.413.531,00)
36	KECAMATAN SARANG	-	(38.327.531,00)	(2.570.882,00)	(40.898.413,00)
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	(71.041.273,00)	(60.093.945,00)	(131.135.218,00)
38	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANIAN	1.405.000,00	(236.724.536,00)	(1.111.207.056,00)	(1.347.931.592,00)
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	(371.293.171,00)	(15.442.520,00)	(386.735.691,00)
40	DINAS ESDM	-	(154.548.121,00)	(4.009.480.070,00)	(4.164.028.191,00)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	19.969.060,00	(106.268.965,00)	(1.027.187.366,00)	(1.133.456.332,00)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.974.533.895,00	(159.330.768,00)	(18.338.842.402,00)	(18.498.173.170,00)
	JUMLAH	(55.102.557.875,73)	(150.914.014.001,00)	(1.378.970.614,94)	(264.703.984.615,94)

B. REKOMENDASI

1. Sisa lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2014 yang mencapai 200 Milyar lebih jangan sampai terulang lagi pada APBD Tahun 2015.
2. Mengingat Tahun 2015 sudah berjalan 6 bulan, maka untuk kegiatan di Tahun 2015 (terutama kegiatan fisik) segera dilaksanakan, karena masyarakat sudah menunggu kegiatan tersebut.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 24 Juni 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
BADAN ANGGARAN**

Ketua,
ttd

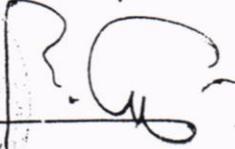
Sekretaris
ttd

H. MAJID KAMIL MZ

Drs. ACHMAD MUALIF

Sesuai dengan aslinya

Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang


Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

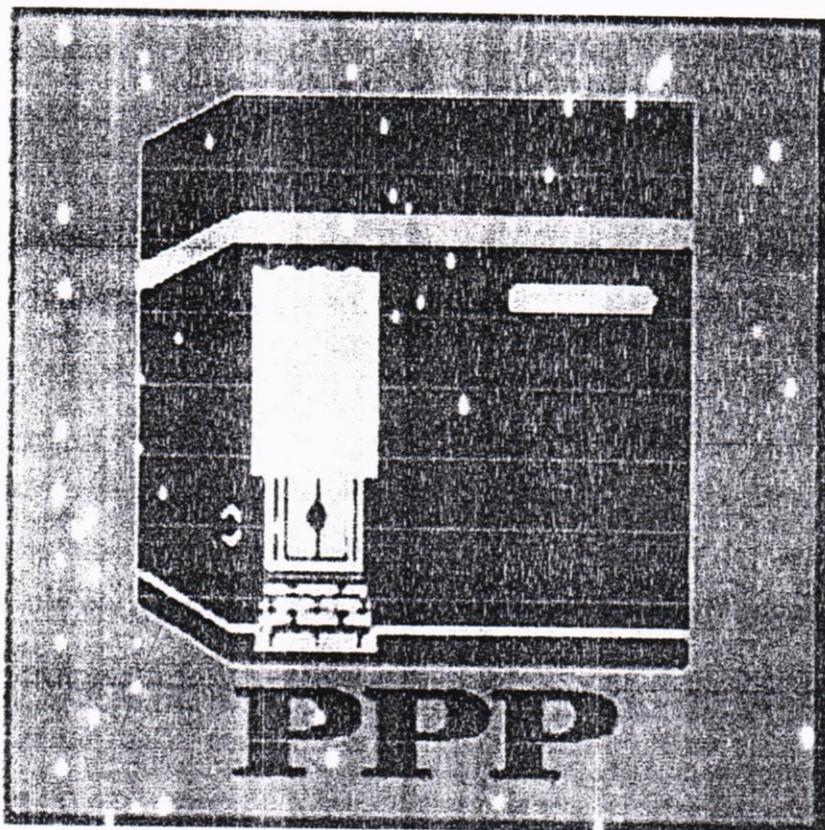
PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RA PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG, TAHUN ANGGARAN 2014



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI: KAMIS, TANGGAL: 25 JUNI 2015

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG, TAHUN ANGGARAN 2014

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamd'ulillah, Wassholatu wassalamu a'laa Rosulillah ibni Abdillah, Wa a'la alihi
Washolihibi wamanwalah..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- Sdr. Bupati Rembang
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang
- Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai dihari kiyamat.

Sdr. Bupati dan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan baik, dan juga kepada TAPD, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan dan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 ini, dapat selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan, mulai dari Pembahasan ditingkat komisi bersama SKPD, dan Banggar bersana TAPD.

Sdr. Bupati dan sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum pendapat akhir ini kami akhiri, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan beberapa masukan, saran dan himbauan , antara lain :

1. Melihat realisasi APBD 2014, dimana terdapat SILPA yang cukup tinggi, hal ini harus dijadikan bahan pelajaran yang serius, untuk itu kami dari F-PPP menghimbau, agar sdr. Bupati dan jajarannya, didalam melaksanakan APBD tahun mendatang, SILPA dapat ditekan sekecil mungkin.
2. Hal-hal yang menjadi dasar hukum yang tidak jelas karena timbulnya multi tafsir, seperti pada UU No. 23 Tahun 2014, pasal 298 , sehingga SKPD yang bersangkutan tidak berani melaksanakan kegiatannya, untuk itu kami minta agar Pemkab Rembang segera melakukan Konsultasi pada pihak yang lebih tinggi.
3. Dengan dilakukan kegiatan "Harmonisasi Pemahaman Pertanggungjawaban Anggaran Kegiatan Belanja Daerah, Dalam Perspektif Hukum" oleh Pemkab Rembang, pada tanggal 23 Juni 2015, dengan nara sumber dari pihak APH di tingkat Propinsi (Kajati), hal tersebut sebagai pencerahan dan pendorong semangat bangkit pada seluruh SKPD, maka untuk mengejar keterlambatan progres di APBD 2015 ini, kami minta agar Pemkab. Melakukan langkah-2 strategis yang tepat.
4. Sesuai dengan beberapa catatan yang termaktub didalam Pemandangan umum kami, dan mencermati jawaban sdr. Bupati, bahwa berkenaan dengan adanya kegiatan yang bisa dilaksanakan, mohon untuk segera dijalankan .
5. Kami dari F-PPP mohon, kepada sdr. Bupati, agar untuk segera memerintahkan TAPD, untuk menyusun dan mengajukan Rancangan KUA / PPAS APBD Perubahan 2015, untuk segera ditindak lanjuti dan dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, setelah mencermati dan mengevaluasi terhadap RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 secara keseluruhan, menyampaikan pendapat akhir bahwa, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim " MENERIMA DAN MENYETUJUI " Raperda PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2014, untuk ditetapkan menjadi Perda PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2014, dengan segala perubahannya.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2014, untuk dijadikan Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2014.

Trima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

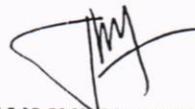
Rembang , 25 Juni 2015

KETUA


SUGIHARTO



SEKRETARIS


ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2014**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 25 JUNI 2015

Dibacakan oleh : H. ISLAHUDDIN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194, 693290, 693291

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2014**

KAMIS, 25 JUNI 2015

Dibacakan oleh : H. ISLAHUDDIN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Saudara Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali pendapat fraksi ini, Kami mengajak kepada hadirin yang terhormat marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna ini dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi, Semoga mendapatkan hasil dan keputusan yang benar - benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Rembang.

Kami juga menyampaikan apresiasi terhadap teman - teman anggota Dewan dan hadirin semuanya yang masih semangat mengikuti persidangan ini walaupun kita tetap menjalankan ibadah puasa yang menahan lapar dan dahaga semoga kita selalu mendapat kelimpahan berkah dari Allah SWT.

Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Kami Fraksi Demokrat Menerima dan Menyetujui ^{PAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD} RAPBD tahun 2014 ditetapkan sebagai ~~PERDA APBD tahun 2014.~~ ^{PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TH 2014.}

Dalam kesempatan yang baik ini pula kami Fraksi Demokrat memberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti antara lain :

1. Mohon kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah supaya membuat rencana untuk mengantisipasi hal - hal yang tidak kita inginkan di musim kemarau ini dan memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan desa - desa yang kekurangan air supaya di bantu.
2. Kami sekali lagi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang tanggap terhadap lonjakan harga - harga sembako yang melambung tinggi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan supaya masyarakat bisa menjalankan puasa dengan tenang.

Bupati dan Sidang Dewan yang Kami hormati,

Demikian pendapat fraksi demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara Bupati, Ketua dan para wakil ketua DPRD, segenap Anggota Dewan yang terhormat serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 25 Juni 2015

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS


EDI KARTONO, SPd, MH.


Hj. HIKMAH PURNAMAWATI, SH.

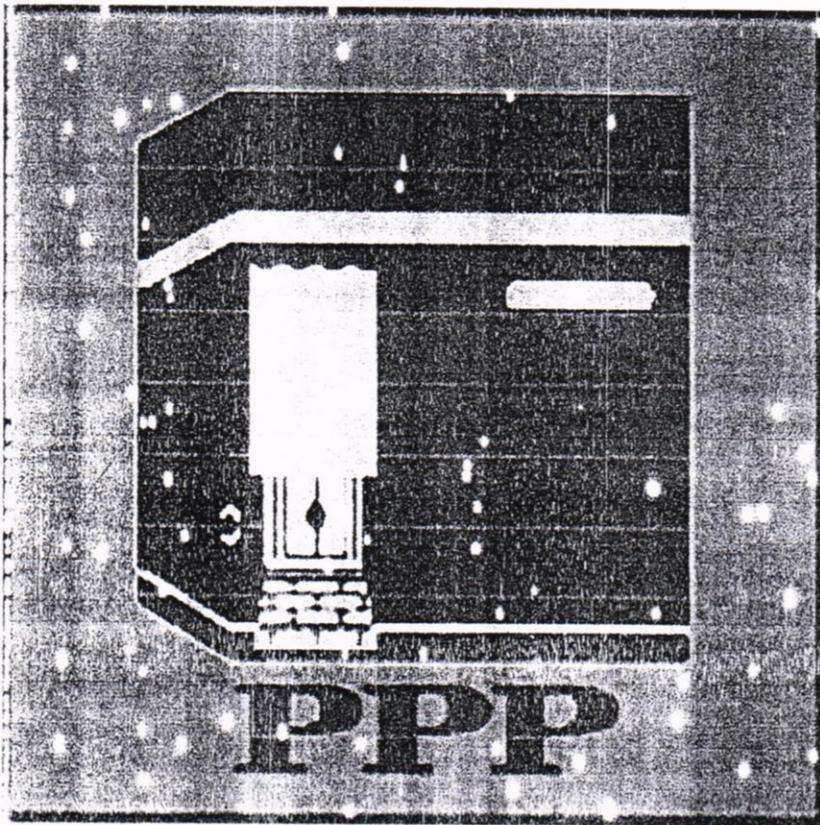
PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG, TAHUN ANGGARAN 2014**



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI: KAMIS, TANGGAL: 25 JUNI 2015

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG, TAHUN ANGGARAN 2014

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah, Wassholatu wassalamu a'laa Rosulillah ibni Abdillah, Wa a'la alihi Washohbihi wamanwalah..., Amma ba'du ...

Yang kami hormati :

- Sdr Bupati Rembang
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat di lingkungan Kabupaten Rembang
- Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai dihari kiyamat.

Sdr. Bupati dan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan baik, dan juga kepada TAPD, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan dan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 ini, dapat selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan, mulai dari Pembahasan ditingkat komisi bersama SKPD, dan Banggar bersana TAPD.

Sdr. Bupati dan sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum pendapat akhir ini kami akhiri, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan beberapa masukan, saran dan himbauan , antara lain :

1. Melihat realisasi APBD 2014, dimana terdapat SILPA yang cukup tinggi, hal ini harus dijadikan bahan pelajaran yang serius, untuk itu kami dari F-PPP menghimbau, agar sdr. Bupati dan jajarannya, didalam melaksanakan APBD tahun mendatang, SILPA dapat ditekan sekecil mungkin.
2. Hal-hal yang menjadi dasar hukum yang tidak jelas karena timbulnya multi tafsir, seperti pada UU No. 23 Tahun 2014, pasal 298 , sehingga SKPD yang bersangkutan tidak berani melaksanakan kegiatannya, untuk itu kami minta agar Pemkab Rembang segera melakukan Konsultasi pada pihak yang lebih tinggi.
3. Dengan dilakukan kegiatan "Harmonisasi Pemahaman Pertanggungjawaban Anggaran Kegiatan Belanja Daerah, Dalam Perspektif Hukum" oleh Pemkab Rembang, pada tanggal 23 Juni 2015, dengan nara sumber dari pihak APH di tingkat Propinsi (Kajati), hal tersebut sebagai pencerahan dan pendorong semangat bangkit pada seluruh SKPD, maka untuk mengejar keterlambatan progres di APBD 2015 ini, kami minta agar Pemkab. Melakukan langkah-2 strategis yang tepat.
4. Sesuai dengan beberapa catatan yang termaktub didalam Pemandangan umum kami, dan mencermati jawaban sdr. Bupati, bahwa berkenaan dengan adanya kegiatan yang bisa dilaksanakan, mohon untuk segera dijalankan .
5. Kami dari F-PPP mohon, kepada sdr. Bupati, agar untuk segera memerintahkan TAPD, untuk menyusun dan mengajukan Rancangan KUA / PPAS APBD Perubahan 2015, untuk segera ditindak lanjuti dan dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, setelah mencermati dan mengevaluasi terhadap RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 secara keseluruhan, menyampaikan pendapat akhir bahwa, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim " MENERIMA DAN MENYETUIJI " Raperda PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2014, untuk ditetapkan menjadi Perda PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2014, dengan segala perubahannya.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2014, untuk dijadikan Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2014.

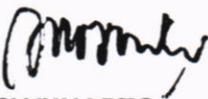
Trima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

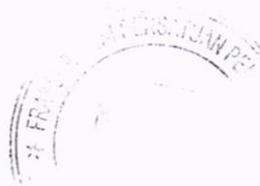
Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Rembang , 25 Juni 2015

KETUA


SUGIHARTO



SEKRETARIS


ZAIMUL UMAM NS

PENDAPAT AKHIR

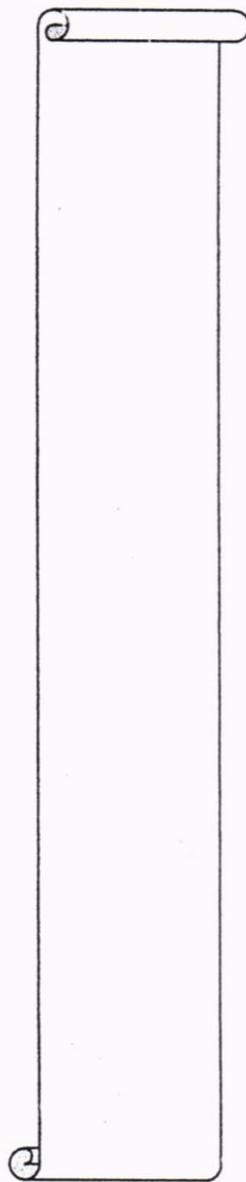
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NASDEM

Terhadap :

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD T.A 2014



tahun 2015



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA LKPD TAHUN ANGGARAN 2015

Dibacakan Oleh : BAHAUD DURROR, S.PI

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupati Rembang
Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD
Rembang
Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Rembang
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang
Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag
dilingkungan Setda Kab. Rembang
Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-
Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi yang telah memberikan semua nikmatnya kepada kita semua. Sehingga kami mampu menghadirkan Pendapat Akhir Fraksi PDIP NASDEM terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2014.

Setelah dilakukan pembahasan terkait LKPD pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014, maka perkenankanlah di forum yang terhormat ini kami menyampaikan hal-hal yang kami rekomendasikan untuk menjadi perhatian Pemkab Rembang juga hal - hal berikut ini :

1. Yang pertama, dengan SILPA yang tinggi di tahun anggaran 2014 kami dari Fraksi PDIP Nasdem berharap pada penganggaran tahun yang akan datang bisa lebih cermat lagi dalam proses perencanaannya.
2. Yang kedua, kami memberikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah mampu melaksanakan pembuatan KTP + Akte yang singkat yaitu dalam waktu sehari bisa langsung jadi. Kami berharap kedepannya supaya ada penganggaran untuk pembangunan tempat/ ruangan pelayanan yang lebih baik, representatif dan nyaman sehingga pelayanan bisa lebih maksimal lagi.
3. Yang ketiga, kami sangat berharap kepada Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengusahakan pelayanan perijinan dokumen kapal mini porsen dibawah 30 GT dilakukan secara terpadu dan 1 atap, serta untuk masa berlaku yang sama. Dan di dalam pemberian rekomendasi untuk subsidi BBM jenis solar ke nelayan mini porsen di bawah 30 GT masa berlakunya tolong untuk diperpanjang yang semula dari 1 bulan menjadi 6 bulan.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan banyak terima kasih. Akhiru kallam.....

WASSALAMUA'ALAIKUM WR, WB

MERDEKA !!!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



KETUA


JASMANI

SEKRETARIS


ALI IRCHAM, ST

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014



REMBANG, 25 JUNI 2015



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos 59251**

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA).
DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014**

Disampaikan oleh : Puji Santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 25 Juni 2015

*ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
SALAM INDONESIA RAYA...*

Yang terhormat Saudara EUPATI Rembang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbalahgia

Mengawali penyampaian pendapat a'chir fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmat NYA yang tiada henti. Solawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Saat ini kita berada di Bulan Romadhon, Semoga kita semua umat Islam diberkahi dibulan Romandhon. Kami menyerukan dan mengajak

marilah kita mengoptimalkan amal dan ibadah di bulan Romadhon ini. Bagi masyarakat yang tidak melakukan Puasa kami berharap untuk bisa menghormati Saudara – saudara kita yang sedang berpuasa. Kepada para pengusaha warung makan / warung kopi / Tempat – tempat Hiburan , kami mengharapkan agar dapat mengatur jam buka warungnya. Sehingga tidak mengganggu kekhusukan bulan Romadhon, serta Fraksi 'GERINDRA meminta agar Dinas pariwisata , Satpol PP dan Instansi terkait yang lain senantiasa selalu melakukan penertiban guna menjaga kondusifitas bulan Romadhon ini.

Bupati, Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Hormati,

Setelah mencermati Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan Anggaran APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014, dalam rapat Komisi-Komisi , rapat Banggar, dan rapat Fraksi, Maka Fraksi Partai GERINDRA **dapat menerima dan menyetujui RAPERDA** Pertanggung jawaban ini ditetapkan menjadi **PERDA** Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2014. Kami juga menyampaikan beberapa Rekomendasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat Akhir Fraksi sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu melakukan monitoring disetiap sekolah-sekolah yang saat ini sedang melakukan penerimaan siswa baru, karena masih dijumpai berbagai bentuk penarikan dana, agar siswa dari golongan kurang mampu juga bisa mendapatkan tempat disetiap sekolah yang dikehendaki. Pemerintah juga perlu melakukan monitoring bagi sekolah-sekolah yang melakukan penerimaan siswa baru dengan cara-cara yang tidak elegan, misalnya apabila masuk sekolahan A, maka siswa akan mendapatkan Hand Phone, siswa mendapatkan uang saku setiap hari bahkan yang memprihatinkan lagi ada sekolah setingkat SMP yang memperbolehkan siswanya ketika berangkat kesekolah menggunakan sepeda motor sendiri.
2. Untuk dilakukan monitoring ditingkat masyarakat, agar sasaran program BPJS bisa tepat sasaran, karena ada beberapa masyarakat kurang mampu yang masih belum mendapatkan BPJS. Terlebih lagi pemerintah perlu

mengadakan sosialisasi program BPJS ketingkat desa, karena masih banyak masyarakat yang belum terdaftar atau mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS.

3. Keberadaan Stok Blangko E - KTP harus dipenuhi oleh karena merupakan kebutuhan mendasar warga. Karena ketersediaan Blangko sampai hari ini tinggal 300 saja dari 1.800 yang beberapa hari lalu didapatkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, kemungkinan hari ini akan habis karena setiap hari sangat banyak masyarakat yang membuat E - KTP.
4. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2015, kami berharap pemerintah segera mengambil langkah percepatan untuk segera melaksanakannya, mengingat kita sudah terlambat 6 bulan. Sisa waktu 6 bulan kedepan agar bisa dioptimalkan kinerjanya, agar anggaran bisa terserap secara maksimal dan tidak meninggalkan SILPA yang lebih besar dari APBD tahun 2014 yang kita bahas saat ini. Apalagi beberapa saat lagi kita akan membahas anggaran APBD Perubahan tahun 2015. Sungguh pekerjaan yang sangat berat.
5. Agar laju Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang tidak terhambat, Kami mengajak semua jajaran Eksekutif, Legeslatif, yudikatif baik Kejaksaan maupun Pengadilan, Kepolisian, TNI, Media Pers, LSM dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Rembang untuk senantiasa membantu proses pelaksanaan pembangunan yang saat ini terhenti dan menciptakan suasana yang kondusif agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Bagaimanapun juga kita dan seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Rembang sangat merasakan dampaknya. Marilah kita para pemimpin masyarakat yang duduk dirapat paripurna ini selalu mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan kita ataupun kepentingan Golongan.

Demikian pendapat akhir kami, Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua, Semoga Tahun 2015 ini **lebih baik** dari

Tahun 2014 kemarin, sehingga kita termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Ariiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 25 Juni 2014

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPRD REMBANG



HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PENDAPAT
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Atas

Hasil Pembahasan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang

Hari Kamis, 25 Juni 2015

Juru Bicara : CATUR WINANTO, SH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Sdr Bupati Rembang.
- Yang terhormat Sdr Ketua dari Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang terhormat Sdr Sekretaris Daerah, Asisten SEKDA dan Kepala Bagian SETDA Kabupaten Rembang.
- Yang terhormat Sdr Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Instansi Kabupaten Rembang
- Yang terhormat Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
- Yang terhormat Sdr Camat dan para hadirin yang berbahagia.

Mengawali acara ini, perkenankanlah kami Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rohmah dan berkah kepada kita semua hingga bisa menghadiri pertemuan yang berbahagia ini.

Para anggota Dewan dan hadirin sekalian.

Setelah melakukan pembahasan yang cukup hangat dalam Rapat Kerja Komisi dengan SKPD maupun Badan Anggaran, tibalah saatnya Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan pendapat akhir atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati beberapa waktu yang lalu.

Secara umum, pelaksanaan APBD 2014 telah berjalan dengan baik dan kami menyampaikan terima kasih kepada semua kalangan, baik jajaran pemerintah maupun semua lapisan masyarakat yang telah mendukung mewujudkan pembangunan di wilayah Kabupaten Rembang. Tetapi ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian kita, khususnya jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang sbb:

1. Pada TA 2014, terdapat SiLPA yang jumlahnya lebih dari Rp. 200 milyar. Ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja rendah, pembangunan tidak maksimal atau bisa dikatakan Pemerintah Kabupaten Rembang belum sungguh-sungguh bekerja. Malahan kalau kita perhatikan mulai TA 2012, setiap tahun angka SILPA semakin meningkat. Sehubungan ini Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabuppten Rembang minta dengan hormat, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang lebih giat bekerja.
2. Sehubungan dengan butir 1, TA 2015 sudah berjalan 6 bulan, namun belum nampak geliat pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur. Kejadian ini menjadikan kerugian warga masyarakat Kabupaten Rembang. Bangunan milik pemerintah, jalan dan jembatan yang rusak tidak bisa diperbaiki, para rekanan dan karyawannya menangis karena tidak mendapatkann lapangan pekerjaan. Maka dari itu mari kita cari solusi agar hal ini tidak membawa kerugian lebih lanjut.
3. Mengenai pengangkatan Pjs. Direktur Utama PDAM Kabupaten Rembang, Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang berpendapat hal ini tidak ada dasar hukumnya. Maka kami

- minta perhatian Sdr. Bupati, agar kedepan tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
4. Pada TA 2014, bisa dilihat bahwa penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah. Menurut SKPD yang bersangkutan hal ini terjadi karena kekeliruan perencanaan. Maka kami minta agar ketika menyusun rencana kerja diteliti dengan cermat.
 5. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) merupakan pasukan penting Pemerintah Kabupaten Rembang, namun sayang sampai saat ini belum memiliki gedung/kantor yang memadai. Maka kami berharap dengan sangat, pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Rembang bisa membangun gedung/kantor Satpol PP.

Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat.

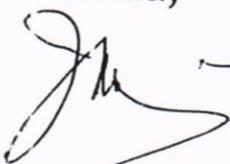
Inti dari pembicaraan ini, Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang **"bisa menerima"** Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. Sebelum turun dari mimbar ini, Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang mengingatkan bahwa tahun 2015 ini merupakan tahun yang rawan. Insyaallah pada tanggal 9 Desember 2015, kita punya kerja Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Rembang. Maka marilah kita bersama menjaga situasi dan kondisi wilayah dan saling menjaga kerukunan. Semoga tidak terjadi halangan apapun.

Akhirnya bila ada tutur kata yang keliru dan tidak berkenan dihati, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Alloh SWT senantiasa memberi kekuatan dan berkah kepada kita semua untuk melaksanakan kewajiban membangun Kabupaten Rembang tercinta ini.

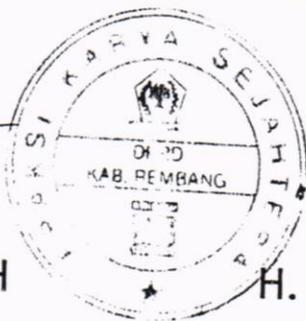
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,



H. ISMARI, SH



Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, SH.

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2014

Dibacakan Oleh : Sukarma'in

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Plt. Bupati Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan
Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD T.A 2014 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Trending topic pada pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang T.A 2015 adalah besarnya SILPA yang mencapai Rp. 209.583.528.065,55. Secara makro, sesuai jawaban Bupati, besarnya komponen SILPA adalah suatu hal yang wajar dan bukan merupakan kejadian luar biasa dalam sebuah penganggaran.

Kami dari Fraksi Harapan berpendapat bahwa :

- a. Penganggaran adalah suatu hal yang jelas dan terukur. Perencanaan dimulai dari unit terkecil di masing-masing satuan kerja berdasarkan kebutuhan riil yang diperkuat dengan data data kuantitatif yang valid, seperti realisasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, jumlah pegawai atau standarisasi harga.
- b. Jika terdapat asumsi-asumsi atau fakta-fakta yang berbeda, maka dapat disesuaikan dalam APBD Perubahan. Pembahasan APBD Perubahan dilaksanakan hanya beberapa bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Pada saat itu, tentunya asumsi-asumsi yang digunakan lebih dekat dengan realitas yang ada.

Kami selalu mendorong upaya pemerintah untuk bekerja lebih cermat dan berhati-hati dalam menyusun perencanaan anggaran. Upaya tersebut adalah salah satu bentuk komitmen kita bersama untuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran

masyarakat. Kami meyakini bahwa kita akan kehilangan waktu untuk memakmurkan masyarakat dan melakukan percepatan pembangunan jika kita kurang berhati-hati dalam menyusun perencanaan penganggaran.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, kami menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

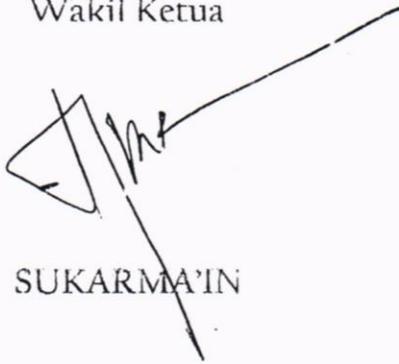
Bilihi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 25 Juni 2015

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua



SUKARMAN

Sekretaris



SAHNINGSIH, SE



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- bahwa dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 ayat (1) huruf (d) Kepala Daerah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama ;
 - bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perber daharaan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Daerah ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.
31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 25 Juni 2015 ; .
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 25 Juni 2015;
 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 25 Juni 2015.

M E M U T U S K A N :

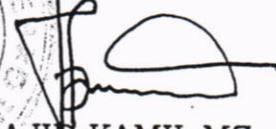
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir ;
- KEDUA** : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum **PERTAMA** Keputusan ini kepada Bupati Rembang ;

- KETIGA : Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

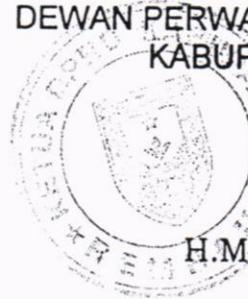
Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juni 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua



H.MAJID KAMIL.MZ





BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

Tanggal, 25 Juli 2015

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Rembang ;
- Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala SKPD se
Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur ***Alhamdulillah*** kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Terakhir DPRD, dalam rangka ***"Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014"*** dalam keadaan sehat wal'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini ijinlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu sesuai dengan arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan Legeslatif, maka akhir Tahun Anggaran 2014, kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, seperti

yang telah kami sampaikan pada sidang pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 lalu, yang merupakan tahap akhir dari siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran, sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Seperti yang telah kami sampaikan pada pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, bahwa dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.384.690.314.469,00 (*Satu trilyun tiga ratus delapan puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.329.587.756.593,37 (*Satu trilyun tiga ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu*

lima ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh rupiah) atau 96,02%. Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.540.612.631.176,00 (*Satu trilyun lima ratus empat puluh milyar enam ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*) direalisasikan sebesar Rp. 1.275.908.646.560,06 (*Satu trilyun dua ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh koma enam rupiah*) atau 82,82%. Sedangkan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 167.086.316.707,00 (*Seratus enam puluh tujuh milyar delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah*) realisasinya sebesar Rp.167.066.868.874,34 (*Seratus enam puluh tujuh milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh empat rupiah*) atau 99,99%. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp. 209.583.528.065,55 (*Dua ratus sembilan milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima koma lima puluh lima rupiah*).

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Laporan keterangan pertanggung jawaban yang saya sampaikan ini merupakan gambaran umum pelaksanaan program prioritas dan strategis selama tahun anggaran 2014 dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai ini merupakan buah karya dan hasil kerja keras kita bersama. semoga amal ibadah saudara dan kita semua akan mendapat imbalan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian telah saya sampaikan Pendapat Akhir Rapat Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

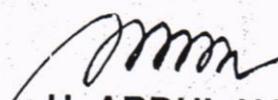
2014. Dan selanjutnya ditetapkan menjadi⁶
Peraturan Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan bimbingan dan kemudahan dalam
membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.

Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang



H. ABDUL HAFIDZ